

**Laporan
Status Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Buton
Tahun 2004**



Diterbitkan : Desember 2004
Data : Januari 2004- Oktober 2004



**Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 69
Telepon/Fax. : (0402) (22264) Bau-Bau**

KATA PENGANTAR

Laporan Status Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tahun 2004 menggambarkan **kondisi** lingkungan hidup secara transparan, **penyebab** terjadinya permasalahan lingkungan hidup, **dampak** yang terjadi, serta **respon** oleh Pemerintah Kabupaten Buton dan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan terjadi. Laporan ini disajikan dalam dua buah buku, yaitu Laporan Status Lingkungan Hidup dan Basisdata Lingkungan Hidup.

Tujuan penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup ini adalah untuk sumber informasi bagi perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Buton, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan.

Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup ini melibatkan berbagai pihak terkait (stakeholder), terutama Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo Kendari yang membantu merampungkan penyusunan laporan ini. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Untuk kesempurnaan laporan ini, maka saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan

Bau-Bau, Desember 2004

An. Bupati Buton
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buton,

H.A. MAHUFU MADRA, SH., MM
NIP. 590 006 037

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR PETA	iii
ABSTRAK	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Isu Utama Lingkungan Hidup Kab.Buton... ..	1
1.2. Tingkat Kesadaran Berbagai Lapisan Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	5
BAB II. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN	7
2.1. Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup.....	7
2.2. Kebijakan Tata Ruang	11
2.3. Kebijakan Sosial, Ekonomi dan Budaya	13
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS KEBIJAKAN.....	44
3.1. Kegiatan Manusia dan Dampaknya	45
3.2. Kondisi Lingkungan	54
3.3. Kegiatan untuk Menanggulangi Perubahan Lingkungan..	59
BAB IV. REKOMENDASI	65

DAFTAR TABEL

Teks	Halaman
1. Produksi Tanaman pangan di Kabupaten Buton.....	30
2. Produksi Perkebunan di Kab. Buton.....	32
3. Potensi Aspal di Kab. Buton	42
4. Potensi Bahan Tambang di Kabupaten Buton	42
5. Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap	46
6. Perkembangan Produksi Aspal Buton 1997-2003	49
7. Rata-rata Hasil Pengukuran Kualitas Air	51
8. Hasil Pengukuran Kualitas Air laut di Kab. Buton.....	53
9. Kualitas Udara Kota Pasarwajo Kabupaten Buton	55

DAFTAR GAMBAR

Teks	Halaman
1. Model Tekanan-Status-Response (P-S-R)	45
2. Hubungan antara kepunahan dan imigrasi spesis pada Pulau kecil	59

DAFTAR PETA

Teks	Halaman
1. Peta Kabupaten Buton.....	68
2. Peta Propinsi Sulawesi Tenggara	69

ABSTRAK

Kabupaten Buton secara geografis terletak di bagian selatan garis khtaulistiwa, memanjang dari utara ke selatan diantara $4,30^{\circ}$ – $6,25^{\circ}$ Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur diantara $120,00^{\circ}$ – $123,34^{\circ}$ Bujur Timur, meliputi sebagian Pulau Muna, dan sebagian Pulau Buton. Secara administrasi Kabupaten Buton terletak pada posisi dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Muna, dan Kabupaten Kolaka
- Di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores,
- Di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda dan Kabupaten Wakatobi
- Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bombana.

Luas wilayah Kabupaten Buton saat ini adalah $20.383,42 \text{ km}^2$ terdiri atas daratan 2.758 km^2 atau $13,53 \%$ dan lautan 17.625 km^2 atau $86,47 \%$ dari luas wilayah Kabupaten Buton.

Kondisi topografi di Kabupaten Buton umumnya bergunung, bergelombang dan berbukit. Diantara gunung-gunng dan bukit terbentang dataran yang merupakan lahan potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Kawasan ini memiliki hutan seluas 413.916 ha , sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian $100 - 500 \text{ m}$ di atas permukaan laut, dengan kemiringan berkisar dari 0 sampai 40% .

Kabupaten Buton memiliki beberapa sungai yang besar dibeberapa kecamatan. Sungai-sungai tersebut pada umumnya memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk sumber tenaga listrik, irigasi dan sumber air bersih bagi masyarakat. Beberapa sungai besar yang di Kabupaten Buton antara lain sungai

Sampolawa di Sampolawa, sungai Winto dan Tondo di Pasarwajo, sungai Malaoge, Tokulo dan Wolowa di Kecamatan Lasalimu.

Dilihat dari aspek oceanografi, Kabupaten Buton memiliki lautan yang cukup luas yaitu sekitar 21.054,69 km², memiliki potensi untuk pengembangan usaha perikanan, kelautan dan wisata bahari, karena disamping hasil ikan dan hasil laut lainnya juga memiliki panorama alam yang sangat indah yang tidak kalah menariknya dibanding daerah lain di Indonesia. Kabupaten Buton memiliki 134 pulau, terdiri dari 23 pulau berpenghuni dan 111 pulau tidak berpenghuni.

Keadaan iklim di Kabupaten Buton pada umumnya sama dengan iklim daerah lain di Indonesia yaitu mempunyai 2 musim yakni musim hujan dan kemarau.

Jumlah penduduk Kabupaten Buton Tahun 2003 sekitar 256,030 jiwa yang tersebar pada 14 Kecamatan, 24 Kelurahan dan 146 Desa, dengan laju pertumbuhan Penduduk sekitar 2,25 persen. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terpadat pada Kecamatan Batuatas yakni sekitar 5,84 persen.

Kebijakan pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Buton diarahkan pada beberapa aspek yakni : (a). Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya alam Alam agar berhasil guna, berdaya guna dan berkelanjutan. (b). Mengupayakan diregulasi dan debirokratisasi yang kondusif agar dapat mendorong minat pengusaha, baik pengusaha dalam Negeri maupun Luar Negeri untuk mengembangkan usaha pengelolaan sumberdaya alam dengan mengutamakan azas efisiensi, ramah Lingkungan, berkelanjutan dan tetap mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, (c) Menata kembali Sistem Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumberdaya alam, Tata Ruang dan Wilayah Pembangunan dalam rangka Implementasi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (d) Mengupayakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam

pengelolaan sumberdaya alam melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan secara optimal, (e) Mendorong, mengembangkan dan memperkuat jaringan daya tembus pemasaran produk barang dan jasa, baik pasar lokal atau Daerah maupun Luar Negeri yang di dukung oleh sarana transportasi dan komunikasi yang memadai serta daya saing tinggi yang memenuhi Standar Internasional, (f) Membentuk lembaga pengkajian dan pusat Informasi sumberdaya Daerah, dan (g). Memberdayakan Lembaga – lembaga yang terkait dan bertanggung Jawab dalam pengelolaan Sumberdaya alam.

Kebijakan tata ruang Kabupaten Buton telah dituangkan dalam Perda nomor 7 tahun 2000 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton dan (2) Perda nomor 9 tahun 2000 tentang izin Peruntukan Penggunaan Tanah. Kebijakan tata ruang Kabupaten Buton disusun dalam kebijakan wilayah pembangunan sebagai berikut: (a) **Kota Pasar Wajo**, sebagai pusat pertumbuhan Sub Wilayah Pembangunan I memiliki fungsi dan peranan sebagai Kota Ordo III, meliputi Kecamatan Pasarwajo, Kecamatan Sampolawa dan Kecamatan Batauga, (b) **Kota Mataumpana**, sebagai pusat pertumbuhan Sub Wilayah Pembangunan III memiliki fungsi dan peranan sebagai kota Ordo III, meliputi Kecamatan Kapontori dan Kecamatan Lasalimu, (c) **Kota Lombe**, sebagai pusat pertumbuhan Sub Wilayah Pembangunan IV memiliki fungsi dan peranan sebagai kota Ordo III, dengan cakupan wilayahnya adalah Kecamatan Gu, Kecamatan Lakudo dan Kecamatan Mawasangka.

Bidang kebijakan sosial budaya diarahkan pada aspek pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemuda dan olah raga, agama, hukum, politik lokal, pekerjaan umum, pemberdayaan perempuan. Sedangkan kebijakan bidang sosial ekonomi diarahkan pada peningkatan sector-sektor seperti pertanian tanaman pangan, perikanan dan kelautan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perhubungan, industri dan perdagangan, koperasi dan UKM, dan pertambangan dan energi.

Evaluasi dan analisis terhadap kebijakan pembangunan di Kabupaten Buton dilakukan dengan pendekatan model Tekanan-Status-Respon (Pressure-State-Response/P-S-R model). Berdasarkan pendekatan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa tekanan penduduk yang paling besar terhadap lingkungan dan sumberdaya alam adalah: (a) pertanian, (b) Perikanan dan kelautan; (c) pertambangan dan energi dan (d) industri pengolahan hasil pertanian, kehutanan dan perikanan dan kelautan.

Status lingkungan hidup di Kabupaten Buton dapat disimpulkan bahwa kualitas udara dan air serta tanah masih cukup baik. Namun demikian secara sporadis telah terjadi kerusakan lingkungan oleh aktivitas seperti penebangan liar, perambahan hutan, penggunaan bahan peledak dan bus.

Untuk menanggulangi perubahan lingkungan tersebut maka pemerintah Kabupaten Buton telah mengembangkan berbagai kebijakan pembangunan lingkungan hidup, tata ruang dan sosial ekonomi serta sosial budaya secara terintegrasi. Disamping itu, berbagai lapisan masyarakat yang difasilitasi oleh jaringan LSM pesisir, pemerintah Kabupaten Buton dan Perguruan Tinggi telah melakukan berbagai kegiatan rehabilitasi, restorasi dan remediasi sebagai respon terhadap perubahan lingkungan yang telah terjadi. Umumnya masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir telah mengalihkan kegiatannya pada budidaya rumput laut dan karamba jaring apung, sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap sumberdaya dan lingkungan di Kabupaten Buton.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Isu Utama Lingkungan Hidup Kabupaten Buton

Ada beberapa faktor kunci penyebab kemunduran kualitas lingkungan di Kabupaten Buton yaitu penambahan penduduk, kebijakan yang kurang tepat, kemiskinan (status ekonomi) dan kerawanan sosial, lemahnya koordinasi dan penegakkan hukum.

Masalah penambahan penduduk secara langsung akan memberikan beban yang makin berat terhadap sumberdaya alam dan lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang pesat ini akhirnya mempunyai kaitan dengan kemerosotan kualitas hidup manusia dan kemunduran kualitasn lingkungan hidup secara keseluruhan.

Sebenarnya masalah pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor saja yang terkait dengan berbagai faktor yang lain dalam menimbulkan kemunduran kualitas lingkungan. Faktor lain yang dianggap cukup penting dalam meningkatkan masalah lingkungan hidup adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipacu untuk memenuhi tuntutan yang terus menerus meningkat dalam menaikkan kesejahteraan diri manusia. Hal ini ternyata telah mendorong berbagai praktek teknologi yang mengeksploitasi sumberdaya alam secara kurang bertanggungjawab serta memacu konsumsi mewah yang berlebihan, sehingga mengakibatkan berbagai kemerosotan kualitas lingkungan di Kabupaten Buton.

Faktor pokok yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan adalah teknologi yang mencemari (*polluting technology*) untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dalam mengeksploitasi sumberdaya alam yang mendorong konsumsi sumberdaya alam secara berlebihan atau mewah (*effluent*

consumption) dan limbah yang dihasilkan kedua hal tersebut. Selebihnya adalah kekurangtepatan kebijaksanaan, serta masalah keamanan dan ketentraman sosial.

Jumlah penduduk Kabupaten Buton tahun 2003 adalah 256.030 jiwa yang tersebar pada 14 (empat belas) Kecamatan, 24 kelurahan dan 146 Desa. Sebagian besar masyarakat tersebut mengeksploitasi dan menggantungkan hidupnya secara langsung pada sumberdaya alam yang bersifat ekstraktif, sehingga dapat mengganggu keberlanjutan sumberdaya alam tersebut. Dalam mengeksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Buton, masyarakat sering mengabaikan atau tidak tahu kaidah-kaidah ekologis. Akibatnya kondisi lingkungan hidup saat ini di Kabupaten Buton semakin terpuruk kualitasnya.

Di wilayah pesisir dan laut kerusakan lingkungan hidup dan sumberdaya alam disebabkan oleh aktivitas masyarakat, antara lain penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan racun, terutama di kawasan terumbu karang, gejala tangkap lebih (*over fishing*) yang dapat dibuktikan dengan makin mengecilnya ukuran hasil tangkapan ikan yang didaratkan di TPI. Semakin maraknya armada perikanan bagang yang menggunakan bahan peledak di Buton merupakan ancaman yang sangat serius terhadap kelestarian sumberdaya hayati di Kabupaten Buton tersebut.

Kerusakan lingkungan di darat khususnya sumberdaya hutan disebabkan oleh penebangan liar, peladangan berpindah pada lereng bukit/gunung, konversi hutan menjadi lahan pertanian dan permukiman. Disamping itu, kawasan hutan juga dikonversi untuk peruntukkan kegiatan ekonomi lainnya seperti tambang aspal di Kecamatan Pasarwajo. Dampak kegiatan tersebut adalah terjadinya erosi

Masalah erosi, abrasi dan pendangkalan perairan dan sungai yang berlangsung cepat akibat pembabatan hutan mangrove, pembukaan lahan di pegunungan dan aktivitas pertambangan juga merupakan masalah serius yang perlu mendapat perhatian. Erosi dan abrasi dapat menyebabkan munculnya tanah timbul, terutama dekat muara-muara sungai, sehingga dapat mengganggu aktifitas pelayaran. Selain itu, penurunan kualitas perairan akibat pencemaran di sungai juga merupakan masalah dalam pemanfaatan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta jasa-jasa lingkungan lainnya.

Selain faktor-faktor tersebut di atas, maka apabila ditinjau dari sumberdaya manusianya nampak bahwa masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumberdaya alam di Kabupaten Buton sebagian besar mempunyai pengetahuan, keterampilan yang sangat terbatas dan modal usaha yang kecil. Sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan yang baik di daerah ini.

Dari sudut kelembagaan terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam Kabupaten Buton, antara lain adalah (1) jumlah dan kemampuan sumberdaya manusia yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan sangat minim; (2) masih kurangnya pemahaman tentang hukum lingkungan baik di tingkat masyarakat maupun aparat; (3) koordinasi antar instansi terkait masih lemah; (4) koordinasi dan pengawasan dibidang lingkungan belum berjalan dengan baik; (5) mekanisme perencanaan belum direncanakan secara bottom-up; (6) sistem pembinaan profesi aparat masih belum konsisten; (8) masih terbatasnya/kurangnya laporan instansi terkait tentang potensi yang ada di Kabupaten Buton; (9) rencana tata ruang wilayah pesisir Kabupaten Buton belum ada; dan (10) sarana dan prasarana operasional masih kurang. Pembangunan ekonomi Kabupaten Buton masih didominasi oleh sector pertanian, sehingga pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian semakin

meningkat, mengakibatkan semakin luasnya hutan yang terbuka. Meskipun demikian, sumberdaya alam sebagai asset daerah dan modal pembangunan harus dimanfaatkan secara bijaksana dengan memperhatikan kelestariannya atau dengan kata lain pengelolaanya harus berkelanjutan dengan memperhatikan nilai efisiensi sehingga, kebutuhan dan aspirasi generasi yang akan datang dapat terakomodasi. Aspek kelestarian dan tindakan konservasi masih kurang mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Para pelaku produksi di dalam pengelolaan sumber daya alam kebanyakan masih berorientasi pada keuntungan perusahaan jangka pendek. Biaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan (*enviromental and natural resources cost*) masih sedikit sekali dipertimbangkan dan dialokasikan.

Proses pengrusakan lingkungan hidup dan sumberdaya alam di Kabupaten Buton masih belum berhasil di kendalikan dan diatasi oleh pemerintah, apalagi pada masa krisis ekonomi yang menimpa bangsa ini masalah lingkungan cenderung semakin kompleks dan rumit sehingga pendekatan pengelolaan terpadu harus menjadi pilihan mutlak di Kabupaten Buton.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketengahkan isu-isu pokok lingkungan yang utama di Kabupaten Buton adalah:

- a. Kerusakan dan menipisnya sumberdaya hutan;
- b. Penurunan kualitas dan manfaat sumberdaya wilayah pesisir dan laut;
- c. Penurunan Keanekaragaman hayati;
- d. Lemahnya koordinasi dan penegakkan hukum dibidang lingkungan hidup;
- e. Erosi dan sedimentasi tidak terkendali
- f. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia
- g. Kerawanan Sosial.

1.2. Tingkat Kesadaran Berbagai Lapisan Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2004

Secara kultural, masyarakat Kabupaten Buton, memiliki berbagai kearifan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Masyarakat memahami bahwa kerusakan lingkungan baik di darat, maupun di laut, terjadi akibat ulah aktivitas manusia yang tidak bertanggungjawab. Fenomena kearifan ini ditandai dengan perilaku pengambilan hasil hutan dan perairan untuk kebutuhan hidup secara terbatas, serta berbagai konsep hubungan harmonis dengan alam dan dilakukan melalui prinsip-prinsip keteladanan para pemimpin, tokoh adat dan tokoh agama. Ketika terjadi penambahan penduduk dan bergesernya pola interaksi manusia dari perjuangan hidup (*struggle for life*) menjadi orientasi materialistik maka terjadi eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan sehingga memudahkan kearifan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Contoh kerarifan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan adalah kaindea, hutan kaombu, dan implementasi filsafat Buton yaitu martabat tujuh. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sudah tidak dikenal dan dipraktekkan oleh sebagian besar masyarakat Buton.

Sejak Tahun 1996 yaitu mulai aktifnya LSM lokal di Sulawesi Tenggara dan di Kabupaten Buton, telah dilakukan kegiatan pemberdayaan dan advokasi dibidang lingkungan hidup dan diperkuat oleh kegiatan serupa yang dilaksanakan oleh pemerintah dan Perguruan Tinggi, memunculkan kembali kesadaran baru bagi masyarakat. Beberapa program dan peristiwa penting yang dapat dijadikan tolok ukur membangkitnya kesadaran masyarakat dalam bidang pelestarian lingkungan antara lain adalah :

- a. Penggunaan terumbu karang buatan sebagai upaya pemulihan biodiversitas pada wilayah tangkapan nelayan;
- b. Bermunculannya aktivitas budidaya komoditas perikanan alternatif dari kegiatan penangkapan rumput laut, ikan kerapu, ikan putih dan lain-lain.

- c. Upaya pembangunan pertambangan berwawasan lingkungan
- d. Partisipasi masyarakat dalam pengendalian aktivitas penyebab kerawanan social dan penanaman bakau di Desa Tira-Tira Kecamatan Lasalimu Selatan
- e. Pengamanan wilayah pesisir Lasalimu oleh jaringan LSM Pesisir dan laut melibatkan masyarakat.

BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

2.1. Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup

2.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Buton

Pola dasar Kabupaten Buton mengamanahkan perlunya upaya untuk :

- a. memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan kawasan ekonomi terpadu;
- b. menata kembali pengelolaan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih efektif dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. mengoptimalkan pengelolaan potensi, pada setiap kecamatan dan desa/kelurahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- d. mengembangkan wilayah pemerintahan berdasarkan potensi daerah yang dimiliki;
- e. penataan pemanfaatan ruang untuk berbagai kepentingan pembangunan ke dalam peraturan daerah;
- f. memberikan dukungan terhadap pengembangan kawasan andalan.

2.1.2. Visi dan Misi Kabupaten Buton

Visi Kabupaten Buton Tahun 2006 adalah “ terwujudnya Kabupaten Buton sebagai Kawasan Bisnis dan Budaya Terdepan”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusun misi sebagai berikut:

a. Misi Pelayanan

Mengemban sistim pelayanan yang prima bagi masyarakat secara adil, tepat, transparan, terjangkau, tidak diskriminatif, mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Misi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Menciptakan sistim dan iklim pendidikan di Kabupaten Buton yang demokratis dan bermutu guna mempertanggunghkan akhlak mulia, kreatif, berwawasan kebangsaan, sehat, berdisiplin dan bertanggungjawab,

berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia.

c. Misi Lingkungan Hidup dan Sumberdaya alam

Menggali potensi Sumber Daya Alam (kelautan, pertambangan dan pertanian) dan peluang membangun yang masih terpendam menjadi sumber daya yang produktif untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan PAD dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas keseimbangan dan keserasian lingkungan.

d. Misi Kesejahteraan sosial dan Budaya/Kearifan Lokal

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan kualitas kehidupan yang layak di semua bidang serta memberi perhatian utama pada kebutuhan dasar masyarakat yaitu sandang pangan, prasarana kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan berdasar pada SDA dan SDM yang produktif, mandiri, maju dan berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, mencintai dan menghargai nilai-nilai budaya lokal.

e. Misi Pengawasan, Kepemerintahan yang baik, Aparat yang Bersih dan Berbudaya.

Meningkatkan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui pelaksanaan pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, baik melalui DPRD maupun kelompok masyarakat dan LSM untuk mencapai efisiensi dan efektifitas anggaran serta mutu pembangunan dan untuk menghindari praktek KKN, mewujudkan otonomi daerah yang merata dan bertanggungjawab, pemerataan pembangunan antar kecamatan sesuai kemampuan daerah serta menciptakan tatanan pemerintahan yang baik, demokratis, berbudaya dan bertanggungjawab yang didukung oleh aparaturnegara

yang berfungsi melayani masyarakat, memiliki profesionalisme yang mantap, berdaya guna dan berhasil guna.

2.1.3. Kebijakan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Buton

Sebagai bagian integral dari visi Pembangunan Daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 1999 – 2005, maka Visi Pembangunan, Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Buton 5 (lima) tahun kedepan yaitu : “ ***Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan, melalui perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.***”

Untuk mewujudkan visi Pembangunan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang telah ditetapkan, maka misi Pembangunan pengendalian Dampak Lingkungan kedepan, yaitu: “ ***Melaksanakan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian, fungsi dan keseimbangan lingkungan, Pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang.***”

Arah kebijakan pembangunan dan pengendalian dampak lingkungan di Kabupaten Buton telah didokumentasikan dalam Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton sampai tahun 2005. Untuk mewujudkan visi Pembangunan Daerah di Bidang Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, maka arah kebijakan Pembangunan pada tahun 2005 adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Alam agar berhasil guna, berdaya guna dan berkelanjutan.
- b. Mengupayakan diregulasi dan Debirokratisasi yang kondusif agar dapat mendorong minat pengusaha, baik pengusaha dalam Negeri maupun Luar Negeri untuk mengembangkan usaha pengelolaan Sumber Daya Alam dengan mengutamakan azas efisiensi, ramah Lingkungan, berkelanjutan dan tetap mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
- c. Menata kembali Sistem Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Wilayah Pembangunan dalam rangka Implementasi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- d. Mengupayakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan secara optimal.
- e. Mendorong, mengembangkan dan memperkuat jaringan daya tembus Pemasaran Produk barang dan jasa, baik pasar lokal atau Daerah maupun Luar Negeri yang di dukung oleh sarana Transportasi dan komunikasi yang memadai serta daya saing tinggi yang memenuhi Standar Internasional.
- f. Membentuk Lembaga Pengkajian dan pusat Informasi Sumber Daya Daerah.
- g. Memberdayakan Lembaga – lembaga yang terkait dan Bertanggung Jawab dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dalam rangka mengoperasionalkan arah kebijakan Pembangunan yang telah ditetapkan dalam Propeda Kabupaten Buton, maka Program prioritas Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada tahun 2005 yaitu:

- a. Pengembangan dan peningkatan akses informasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH).
- b. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan SDA, konservasi dan rehabilitasi.
- c. Pencegahan dan Pengendalian kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup.
- d. Penataan kelembagaan dan penegakan Hukum Pengelolaan SDA dan pelastarian LH.
- e. Peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan SDA dan Pelestarian LH.

2.2. Kebijakan Tata Ruang

Kebijakan tata ruang Kabupaten Buton telah dituangkan dalam Perda nomor 7 tahun 2000 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton dan (2) Perda nomor 9 tahun 2000 tentang izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

Kebijakan tata ruang Kabupaten Buton disusun dalam kebijakan wilayah pembangunan sebagai berikut:

- a. **Kota Pasarwajo**, sebagai pusat pertumbuhan Sub Wilayah Pembangunan I memiliki fungsi dan peranan sebagai Kota Ordo III, Wilayah pelayanan dari fungsi tersebut adalah meliputi seluruh Sub Wilayah Pembangunan I pasarwajo yang meliputi Kecamatan Pasarwajo, Kecamatan Sampolawa dan Kecamatan Batauga.
- b. **Kota Wanci**, sebagai pusat pertumbuhan Sub Wilayah Pembangunan II memiliki fungsi dan peranan sebagai kota Ordo III, Wilayah pelayanan dari fungsi tersebut adalah meliputi seluruh Sub Wilayah Pembangunan II Wakatobi dengan cakupan wilayahnya adalah Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko.
- c. **Kota Mataumpna**, sebagai pusat pertumbuhan Sub Wilayah Pembangunan III memiliki fungsi dan peranan sebagai kota Ordo III, Wilayah pelayanan dari

fungsi tersebut adalah meliputi seluruh Sub Wilayah Pembangunan III Kapontori yaitu Kecamatan Kapontori dan Kecamatan Lasalimu.

- d. **Kota Lombe**, sebagai pusat pertumbuhan Sub Wilayah Pembangunan IV memiliki fungsi dan peranan sebagai kota Ordo III, Wilayah pelayanan dari fungsi tersebut adalah meliputi seluruh Sub Wilayah Pembangunan IV Gulamas dengan cakupan wilayahnya adalah Kecamatan Gu, Kecamatan Lakudo dan Kecamatan Mawasangka.
- e. **Kota Dongkala**, sebagai pusat pertumbuhan Sub Wilayah Pembangunan V memiliki fungsi dan peranan sebagai kota Ordo III, Wilayah pelayanan dari fungsi tersebut adalah meliputi seluruh Sub Wilayah Pembangunan V Kabaena dengan cakupan wilayahnya adalah Kecamatan kabaena dan Kecamatan Kabaena Timur.
- f. **Kota BambaEa**, sebagai pusat pertumbuhan Sub Wilayah Pembangunan VI memiliki fungsi dan peranan sebagai kota Ordo III, Wilayah pelayanan dari fungsi tersebut adalah meliputi seluruh Sub Wilayah Pembangunan VI Poleang dengan wilayahnya meliputi Kecamatan Poleang dan Poleang Timur.
- g. **Kota Kasipute**, sebagai pusat pertumbuhan Sub Wilayah Pembangunan VII memiliki fungsi dan peranan sebagai kota Ordo III, Wilayah pelayanan dari fungsi tersebut adalah meliputi seluruh Sub Wilayah Pembangunan VII Rumbia dan wilayah yang termasuk dalam SWP ini adalah Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Rarowatu.

Setelah pemekaran 2 (dua) daerah otonom yaitu Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi maka wilayah pembangunan Kabupaten Buton dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu: Kota Pasar Wajo, Kota Mataumpana, dan Kota Lombe.

2.3. Kebijakan Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya

2.3.1. Kebijakan Sosial Budaya

1. Pendidikan dan Kebudayaan

Beberapa persoalan yang dihadapi bidang pendidikan di Kabupaten Buton adalah : (i) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan; (ii) masih rendahnya kualitas dan rekuensi pendidikan; (iii) masih lemahnya manajemen pendidikan disamping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di kalangan akademi serta ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antara wilayah geografis yaitu antara perkotaan dan pedesaan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka arah kebijakan pembangunan pendidikan Daerah Kabupaten Buton adalah :

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh masyarakat menuju terciptanya manusi Indonesia yang berkualitas tinggi, baik moral, disiplin, budi pekerti, watak, sikap, kemampuan, dan partisipasi kerja didasarkan pada nilai agama dan budaya;
- b. Meningkatkan kualitas Sumberdaya manusia (SDM) tenaga Edukatif dan Administratif melalui pengembangan kemampuan akademi dan profesional dengan cara memberikan kesempatan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
- c. Menata kurikulum muatan lokal dengan tepat mengacu pada kurikulum nasional yang disesuaikan dengan kondisi daerah guna menunjukkan program pembangunan;
- d. Mengoptimalkan pemberdayaan lembaga – lembaga pendidikan swasta di daerah melalui peningkatan pemberian bantuan fisik dan non fisik serta partisipasi aktif dalam pembangunan secara

- proporsional dan terprogram sehingga dapat berkembang dengan baik dan mandiri;
- e. Meningkatkan peran serta pihak swasta, masyarakat, dan keluarga dalam mendukung terselenggaranya pendidikan;
 - f. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut tidaklah mudah karena beberapa tantangan ke depan yaitu antara lain:

- a. Tantangan yang rumit sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil – hasil pembangunan yang tidak dicapai.
- b. Untuk mengantisipasi era global, dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia kompotens agar masyarakat bersaing dalam pasar kerja global.
- c. Dalam rangka asuransi daerah perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan kebutuhan / keadaan daerah dan peserta pendidikan, serta mendorong partisipasi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Buton sangat memperhatikan pengembangan pendidikan dan untuk itu dikembangkan berbagai program pendidikan Daerah Kabupaten Buton sampai tahun 2006 sebagai berikut:: program pendidikan dasar prasekolah, program pendidikan menengah, dan program pendidikan luar sekolah

2. Kesehatan

Tujuan Pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup bagi setiap orang agar terwujud

derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan bidang kesehatan merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang dalam rangka menghadapi makin ketatnya persaingan bebas pada era globalisasi. Penduduk yang sehat bukan saja menunjang keberhasilan program pembangunan lainnya, akan tetapi akan mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan penduduk.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Buton maka kebijakan kesehatan diarahkan pada

- a. Mendorong peningkatan mutu lingkungan dan perilaku hidup sehat melalui pendekatan paradigma sehat yakni memberikan prioritas kepada upaya promotif dan preventif yaitu upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit disamping upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan, sejak pemuahan dalam kandungan sampai lanjut usia;
- b. Mengembangkan kemandirian dan peran serta masyarakat termasuk dalam pembiayaan pelayanan kesehatan melalui pendekatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM);
- c. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan dan atau penyediaan tenaga kesehatan yang profesional, memiliki keterampilan dan semangat pengabdian yang tinggi, serta di dukung oleh penyediaan alat – alat kesehatan, termasuk obat – obatan dengan biaya yang terjangkau;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan penyakit dan gizi buruk;
- e. Mendorong peningkatan kualitas hidup penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian dan peningkatan kualitas keluarga berencana;

- f. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);

Untuk mewujudkan kebijakan bidang kesehatan maka disusun program sebagai berikut : Program Lingkungan Sehat, Program Perilaku Sehat, Program Upaya Pelayanan Kesehatan, program Sumber Daya Kesehatan, program Upaya Pengawasan Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya, Program Pengembangan Manajemen dan Perumusan Kebijakan Kesehatan, pengembangan Sistem Informasi Kesehatan.

4. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi diperhadapkan pada berbagai permasalahan yang sangat kompleks, hal tersebut terkait dengan kemampuan daerah dalam upaya menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang diharapkan menjadi sumber mata pencaharian penduduk yang dapat memberikan kontribusi pendapatan. Isu yang menonjol pada bidang ini adalah :

- a. Kurang tersedianya lapangan kerja;
- b. Kualitas tenaga kerja yang belum memadai;
- c. Hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja belum berjalan sebagaimana mestinya;
- d. Persebaran penduduk yang belum merata.

Di bidang transmigrasi, Kabupaten Buton merupakan salah satu wilayah tujuan program transmigrasi nasional, sementara dilain pihak daerah ini diperhadapkan pada persoalan penanganan penduduk eksodus pasca kerusuhan Maluku– Ambon dan pasca jajak pendapat

Timor-Timur yang menjadikan wilayah Kabupaten Buton sebagai daerah tujuan eksodus. Akibatnya Kabupaten Buton diharapkan mampu memberikan dukungan yang maksimal dengan menyediakan areal yang berpotensi untuk dijadikan lokasi / unit pemukiman transmigrasi (UPT). Pada tahun 2004 akan ditempatkan transmigrasi di Kecamatan Kapontori.

Penyediaan sub sektor transmigrasi, dititikberatkan pada isolasi desa – desa yang terpencil dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sarannya adalah untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga dapat memberikan kontribusi baru bagi pembangunan daerah.

Kebijakan pembangunan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi diarahkan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja;
- b. Peningkatan pengupahan, jaminan kesejahteraan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, kebebasan berserikat;
- c. Peningkatan kualitas tenaga kerja luar negeri dengan memperhatikan tentang perlindungan tenaga kerja yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja;
- d. Pembangunan kawasan transmigrasi sebagai suatu sistem yang berorientasi harus mampu memberdayakan seluruh potensi lokal;
- e. Peningkatan dan pengembangan masyarakat yang ada di kawasan transmigrasi maupun masyarakat sekitarnya.

Adapun program tenaga kerja dan transmigrasi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :Program Penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja, Program pembinaan dan pengembangan

produktivitas tenaga kerja dan Program pemukiman dan lingkungan transmigrasi

5. Pemuda dan Olah Raga

Berbagai permasalahan pembangunan sosial dan budaya khususnya di bidang kepemudaan dan olah raga adalah masih rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan, belum membudayanya olah raga dan masih rendahnya prestasi olah raga. Dilain pihak meningkatnya angka kenakalan remaja yang disebabkan tidak mampunya pemuda menyaring berbagai budaya barat yang dipertontonkan melalui media informasi baik elektronik dan media massa.

Untuk mengatasi dan mengantisipasi masalah yang lebih besar ke depan maka pembangunan kepemudaan dan olah raga diarahkan pada hal-hal sebaai berikut:

- a. Menumbuh kembangkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia di Kabupaten Buton sehingga memiliki kondisi fisik dan mental yang optimal, melalui pendidikan olahraga di sekolah dan masyarakat;
- b. Menggali dan mengoptimalkan gegerasi muda yang berbakat sebagai upaya pembibitan dan pembinaan olah raga yang berprestasi dan mampu bersaing dalam berbagai pesta olah raga;
- c. Mengaktualisasikan potensi bakat dan minat yang tinggi dari gegerasi muda yang diimplementasikan kedalam bentuk kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya, masyarakat maupun daerahnya;
- d. Membangkitkan minat, bakat dan semangat dikalangan generasi muda dalam rangka menumbuh kembangkan aktifitas

- kewirausahaan terutama dalam bentuk kemitraan yang berdaya saing, unggul dan mandiri;
- e. Melindungi segenap generasi muda secara terpadu dari ancaman dan bahaya NARKOBA yang membahayakan dirinya dan lingkungannya.
 - f. Menciptakan sekaligus memelihara sarana dan prasarana olah raga semaksimal mungkin untuk mempertahankan semangat masyarakat dalam berolah raga dan berprestasi.

Dalam pembinaan pemuda sebagai generasi penerus estafet kepemimpinan maka berbagai program prioritas pembangunan pemuda dan olah raga di Kabupaten Buton akan telah dan akan dilaksanakan pada tahun 2005 adalah:

1. Program pembinaan pemuda diarahkan pada kegiatan pokok
 - a. Membentuk organisasi pemuda baik yang ada di jalur sekolah maupun diluar jalur sekolah / masyarakat disertai dengan program kegiatan;
 - b. Meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja pemuda yang diarahkan bagi peningkatan kompetensi, kemandirian dan profesionalisme;
 - c. Bimbingan dan penyuluhan penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) dan pergaulan bebas;
 - d. Memperluas kesempatan dalam berorganisasi dan berkreasi bagi pemuda secara bebas dan bertanggung jawab, serta terkendali dan terarah;
 - e. Menunjang kegiatan sosial di bidang kepemudaan
2. Program pembinaan keolahragaan, diarahkan pada kegiatan: :
 - a. Menumbuh kembangkan pelaksanaan kompetensi dalam upaya memasyarakatkan olah raga dan mengolah ragakan masyarakat;

- b. Pembinaan olah ragawan yang berbakat / berprestasi;
- c. Pembinaan cabang olah raga unggulan di daerah;
- d. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga.

6. Pariwisata, Seni dan Budaya

Pada prinsipnya pengembangan pariwisata sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN 1999 – 2004 mencakup dimensi ekonomi dan dimensi sosial – budaya. Dalam dimensi ekonomi pengembangan pariwisata merupakan bagian dari upaya peningkatan daya saing untuk menarik kunjungan wisatawan dan sekaligus dapat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat / daerah dan devisa negara. Olehnya itu prioritas kebijakan pengembangan pariwisata daerah terus diarahkan pada peningkatan dan pengembangan produk pariwisata dan pengembangan pemasarannya.

Modal dasar pengembangan pariwisata Kabupaten Buton adalah keberadaan potensi SDA, SDM, tradisi dan budaya. Program pengembangan sumber daya tersebut dikelola melalui pendekatan peningkatan nilai tambah sumber daya secara terpadu melalui strategi pengembangan pemasaran, pengembangan produk serta dukungan amenitas pariwisata yang berlandaskan kepada pemberdayaan masyarakat lokal atau *Community Based Tourism Development*.

Untuk mewujudkan upaya tersebut di atas maka arah kebijakan pemerintah Kabupaten Buton adalah:

- a. Membina, mengembangkan dan menggali kembali prinsip dasar kebudayaan Buton yang bersumber dari warisan budaya leluhur, yang mengandung nilai – nilai universal dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup yang kondusif

- untuk seluruh komponen masyarakat dalam upaya mensukseskan program pembangunan secara keseluruhan;
- b. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai – nilai budaya eksternal serta memilih nilai budaya mana yang kondusif dan serasi untuk dikondisikan dalam rangka inovasi budaya lokal guna menghadapi tantangan pembangunan daerah dimasa sekarang dan masa depan;
 - c. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam seni sebagai wujud penghargaan inspirasi dan kepekaan rasa atas totalitas kehidupan dengan tetap menjunjung tinggi nilai – nilai dan norma – norma etika, moral dan agama;
 - d. Mengembangkan aspirasi terhadap kesenian tradisional sebagai wujud penghargaan atas kebudayaan dan tradisi lokal atau daerah serta nilai – nilai luhur masyarakat yang telah lama mewarnai kehidupan masyarakat yang serasi dan seimbang;
 - e. Melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional dengan menjadikannya sebagai wahan pengembangan potensi pariwisata daerah yang tidak kalah nilai dan keragamannya dengan nilai kesenian dan kebudayaan daerah lainnya di Indonesia;
 - f. Mengembangkan sistem pariwisata yang utuh dan terpadu berdasarakan kondisi dan potensi daerah, baik wisata alam, wisata bahari, wisata pendidikan / penelitian dan potensi daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keamanan lingkungan;
 - g. Mendorong dan memperluas peran serta masyarakat terhadap pelestarian / pemeliharaan adat istiadat, kesenian dan aset wisata sebagai upaya nyata didalam menghindari kepunahan dan rusaknya dan sebagai wahana bagi pengembangan

pariwisata daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).

6. Agama

Dalam rangka mewujudkan cita – cita pembangunan, pemerintah daerah bersama masyarakat berjuang dengan segala daya upaya sejauh kemampuan yang dimilikinya untuk melaksanakan pembangunan bidang agama. Karena agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis, utamanya sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pembangunan. Agama sebagai sistem nilai semestinya dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, keluarga, masyarakat, serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk pembangunan agama perlu mendapat perhatian lebih besar, baik yang berkaitan dengan penghayatan dan pengamalan agama, pembinaan pendidikan agama, maupun pelayanan kehidupan beragama. Dengan memperhatikan kondisi daerah, kesenjangan antara kesemarakan kehidupan beragama disatu pihak, kerapuhan etika dan nilai – nilai agama terjadinya penurunan ahlak mulia, dan kelemahan sendi – sendi moralitas agama dipihak lain secara nyata telah menciptakan kerawanan dalam kehidupan masyarakat. Praktek kriminalitas, perjudian, perilaku susila tidak lagi mengindahkan adab kesopanan dan kesantunan merupakan sebagian dari bukti rendahnya kualitas pengetahuan, pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap ajaran agamanya. Pelayanan kehidupan beragama belum optimal yang tercermin dari belum sempurnanya pelayanan ibadah haji, perkawinan, zakat dan wakaf serta lemahnya pemahaman hukum agama.

Pendidikan agama juga belum dapat dilaksanakan secara optimal antara lain: keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya penguasaan materi dan metodologi pengajaran, belum optimalnya kegiatan belajar mengajar serta belum memadainya jumlah dan mutu tenaga pendidikan. Pendidikan agama juga dinilai belum optimal bagi pengembangan pribadi, watak dan akhlak mulia peserta didik, belum sepenuhnya diarahkan pada latihan pengamalan secara nyata, serta pada pembentukan sikap dan perilaku yang berakhlak mulia. Pengembangan pribadi, watak dan akhlak mulia ini, selain dilakukan oleh lembaga pendidikan formal, juga oleh keluarga, lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan serta tempat – tempat ibadah.

Arah kebijakan pembangunan agama adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan landasan moral, spiritual, dan etika sebagai paradigma fungsi, peran dan kedudukan agama dalam masyarakat;
- b. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan harmonis dan saling menghormati dalam tempat kemajemukan guna tetap menjaga ketentraman masyarakat;
- c. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan formal maupun non formal dalam upaya mengantisipasi dampak perubahan yang terjadi pada semua aspek kehidupan masyarakat;
- d. Peningkatan pengamalan ajaran agama dan penyempurnaan kualitas pelajaran zakat, infaq, sadaqah dan ibadah haji.

7. Hukum

Pembangunan di bidang hukum adalah merupakan salah satu program yang mendukung terwujudnya supremasi hukum dan pemerintahan yang baik. Kebijakan dan program yang dihasilkan oleh pemerintah daerah yang dilandasi oleh semangat desentralisasi akan mempercepat proses pembangunan.

Dengan adanya supremasi di bidang hukum diharapkan akan melahirkan nilai – nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak azasi manusia, yang mana pada masa sebelum reformasi mengalami degradasi. Hal ini dapat dilihat atau ditandai dengan masih adanya peraturan perundang-undangan produk pemerintah yang tidak mengakomodir aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan yang bersendikan hukum agama dan jukum adat. Upaya kedepan yang harus dilakukan adalah dengan menyusun atau membentuk kembali peraturan daerah yang aspiratif dan menyempurnakan mekanisme penyusunan suatu peraturan daerah antara pihak eksekutif dan legislatif. Upaya yang akan ditempuh adalah dengan meningkatkan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat terhadap peraturan perundang – undangan yang akan diberlakukan yang pada akhirnya diharapkan akan tercipta ketaatan, kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat guna membentuk budaya hukum yang baik.

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum selama ini disebabkan antara lain, karena terus berkembangnya kasus – kasus KKN dan pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tidak pernah dihangkau hukum bahkan di era reformasi kini cenderung tumbuh subur, meskipun dengan cara yang

lebih halus. Oleh karena itu, dalam rangka memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum maka upaya – upaya yang akan dilakukan antara lain menginventarisir dan menindak lanjuti secara hukum berbagai kasus KKN dan HAM. Upaya lain yang akan ditempuh adalah dengan memberikan dukungan terhadap aparat penegak hukum dan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

Kebijakan pembangunan di bidang, hukum Kabupaten Buton diarahkan pada :

- a. Mengembangkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum untuk menciptakan budaya hukum yang kondusif demi terciptanya supremasi hukum dan tegaknya negara hukum;
- b. Menata dan melengkapi peraturan daerah secara terpadu berdasarkan aturan hukum nasional dengan tetap mengadopsi hukum agama dan hukum adat termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaian tuntutan reformasi;
- c. Menegakan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran demi tegaknya supremasi hukum serta menghargai hak– hak azasi manusia dan hak – hak asal - usul adat Buton;
- d. Mengembangkan peraturan perundang – undangan dengan peraturan daerah dalam mendukung kegiatan perekonomian, terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas;
- e. Mendorong terbentuknya lembaga perlindungan konsumen;
- f. Mendorong peran lembaga hukum agar di dalam penyelesaian permasalahan hukum;
- g. Memberdayakan lembaga hukum adat didalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

8. Politik Lokal/Daerah

Berbagai permasalahan pembangunan politik dan perwujudan perpolitikan masyarakat di daerah Kabupaten Buton antara lain adalah ketidak seimbangan kekuasaan lembaga – lembaga daerah seperti Legislatif, eksekutif dan yudikatif, belum terakomodatifnya peraturan daerah terhadap dinamika masyarakat, rentannya konflik sosial baik vertikal maupun horizontal, munculnya gejala didintegrasi (etnik) dengan menggalang kekuatan – kekuatan warga / keluarga serta merebaknya berbagai tindak kekerasan dan aksi – aksi dengan sifat pemaksaan kehendak.

Mengacu pada program pembangunan daerah Kabupaten Buton tahun 2002 – 2006, maka arah kebijakan pembangunan bidang politik tahun 2005 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga masyarakat terhadap kedudukan, fungsi dan peran lembaga legislatif, eksekutif serta yudikatif;
- b. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis serta berbudaya politik sebagai cerminan **“Binci-Binci Kuli”** sebagai wahana pemberdayaan hak – hak warga masyarakat dalam menghormati aspirasi politik yang beragam;
- c. Meningkatkan kemandirian partai politik sebagai sarana agregation dan artikulasi politik warga masyarakat dengan memperjuangkan aspirasi rakyat secara transparan dengan meningkatkan fungsi dan peran organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi lembaga swadaya masyarakat;
- d. Meningkatkan pendidikan politik kepada warga masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis yang diletakkan

- atas dasar **“Poangka-angkataka, Poma-maasiaka, Popia-piaraaka, Poma-maeka”** sebagai cerminan perilaku Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945;
- e. Menyelenggarakan pemilihan umum nasional dan pemilihan umum jabatan politik daerah secara lebih berkualitas atas dasar prinsip demokrasi umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan membentuk badan penyelenggaraan pemilihan umum daerah, yang keanggotaannya independen dan non partisan berdasarkan undang – undang dan peraturan daerah;
 - f. Memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berbegara secara berkelanjutan;
 - g. Membangun bangsa dan watak bangsa dengan mengintegrasikan nilai – nilai normatif budaya Buton kedalam kurikulum pada berbagai jenjang pendidikan formal dalam lingkungan Kabupaten Buton.

9. Pekerjaan Umum

Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Buton maka arah kebijakan bidang pekerjaan umum pada tahun 2005 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dan pusat produksi dan pemasaran.
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman.
- d. Prioritas pengelolaan prasarana jalan didasarkan pada hirarki jalan (arteri, kolektor dan lokal).

- e. Dalam situasi krisis multi dimensi pemeliharaan dan peningkatan jalan yang ada lebih diutamakan dari pada pembangunan jaringan jalan baru.
- f. Meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih baik kualitas maupun kuantitas
- g. Menunjang usaha peningkatan produksi pertanian tanaman pangan.

Program prioritas bidang pekerjaan umum di Kabupaten Buton adalah mencakup : program peningkatan sarana jalan dan jembatan, meliputi kegiatan, program perumahan dan permukiman dan program penyempurnaan irigasi dan pengairan Desa

10. Pemberdayaan Perempuan

Berbagai permasalahan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan adalah masih rendahnya kedudukan dan peranan perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Adapun strategi yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat termasuk pemberdayaan perempuan dan keluarga adalah menyangkut penguatan kelembagaan termasuk peningkatan koordinasi antar sektor dan antar lembaga.

Arah kebijakan bidang pemberdayaan perempuan sampai tahun 2006 adalah:

- a. Meningkatkan upaya kemitra sejajar antara laki – laki dan perempuan melalui prinsip keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat sebagai wujud penghargaan atas peradaban hakiki dan hak azasi manusia;

- b. Meningkatkan kualitas peran dan fungsi kemandirian organisasi perempuan agar dapat secara bersama – sama dengan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya dalam berpartisipasi pada bidang pembangunan;
- c. Meningkatkan pemberdayaan perempuan sesuai minat dan bakatnya serta memberikan jaminan ketahanan hukum atas posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat guna mencapai kesejahteraan.

3.3. Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi masih dititikberatkan pada sektor pertanian dalam arti luas yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan dan kelautan, perkebunan peternakan dan kehutanan. Disamping itu sektor pertambangan dan perhubungan. Arah kebijakan masing-masing sektor diuraikan dibawah ini sebagai berikut:

1. Pertanian

Pembangunan pertanian adalah pembangunan yang berbasis sumber daya alam dan berlokasi di pedesaan, dengan pelaku utamanya adalah petani kecil yang merupakan mayoritas dari jumlah penduduk Kabupaten Buton. Mereka mempunyai keterbatasan teknologi, informasi, pengetahuan, keterampilan dan sumber modal yang dimiliki, menekankan kegiatan pertanian yang terbatas pada aspek produksi / budidaya saja. Ditambah lagi dengan dukungan sarana dan prasarana pertanian yang masih terbatas, sehingga pembangunan pertanian tanaman pangan masih membutuhkan penanganan yang serius. Pada kondisi ini, pemerintah memegang peranan yang cukup dominan didalam upaya mensejahterakan petani.

Secara umum tingkat produktivitas petani yang ada di kabupaten Buton masih rendah. Rendahnya tingkat produktivitas petani dapat dilihat dari masih rendahnya tingkat pendapatan yang dihasilkan dari suatu usaha di bidang pertanian dalam kurun waktu tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat produktivitas petani antara lain yaitu : pemanfaatan lahan yang belum optimal, tingkat pengetahuan dan keterampilan yang masih rendah, masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana pertanian, masih terbatas sumber informasi pengembangan pertanian, masih terbatasnya kemampuan petani dalam hal permodalan, masih lemahnya penanganan manajemen usaha tani yang berakibat inefisiensi.

Untuk mengeliminir permasalahan di atas dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan petani khususnya, maka kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan dengan tetap mengacu kepada 4 usaha pokok yaitu : Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi, dan Rehabilitasi dengan titik berat pada kebijakan intensifikasi. Kebijakan intensifikasi diarahkan untuk tetap berorientasi pada pelaksanaan program nasional dalam pembangunan pertanian, yaitu program Ketahanan Pangan dan Program Agribisnis. Beberapa komoditi tanaman pangan dan holtikultura yang strategis untuk pengembangan akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar seperti : padi (padi sawah dan padi gogo), jagung, kacang tanah, bawang merah, jeruk Siompu, dan rambutan.

Kebijakan intensifikasi untuk lahan sawah ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas program intensifikasi padi dengan penerapan paket – paket teknologi yang telah ada dalam upaya peningkatan produktivitas padi. Disamping itu juga ditujukan untuk meningkatkan Intensitas Pertanian (IP) dari sekitar 150 % hingga

mencapai 200 %. Kebijakan intensifikasi untuk lahan kering ditujukan disamping untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas program intensifikasi lahan kering yang ada seperti jagung, kedele dan beberapa komoditi sayuran dan buah – buahan juga ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, baik terhadap lahan pekarangan maupun kebun – kebun masyarakat dengan jenis komoditi yang bernilai ekonomis dengan tetap berorientasi pada agribisnis.

Potensi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Buton seluas 400.802 Ha yang terdiri dari ubi kayu 9221 Ha, jagung 400.458, kacang tanah 832 Ha dan kacang kedelai 291 Ha. Produksi masing-masing komoditas pertanian tanaman pangan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Potensi Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Buton

No	Jenis	Potensi (Ha)	Produksi (ton)	Keterangan
1.	Ubi kayu	9221	135.788	- Produktifitas 163,23 kw/ha
2.	Jagung	400458	24.906	Produktifitas 18,39 kw/ha Luas Lahan belum digarap 26,937 Ha
3.	Kacang Tanah	832	1389	- Produktifitas 15,4 kw/ha
4.	Kacang Kedele	291	378	- Produktifitas 13,79 kw/ha

Sumber : Bappeda Kabupaten Buton, 2004

2. Perikanan dan Kelautan

Pembangunan perikanan dan kelautan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan keluarga petani ikan dan nelayan melalui peningkatan produksi pada sub sektor perikanan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan pada sub sektor perikanan diperlukan beberapa program strategis yang harus menjadi perhatian, dan menempatkan sektor tersebut sebagai sektor unggulan daerah. Perkembangan peningkatan produksi perikanan dan hasil laut serta perkembangan luas areal budidaya perikanan dan hasil laut maupun volume perdagangan antar pulau dan ekspor hasil perikanan kabupaten Buton dalam 3 (tiga) tahun terakhir, belum menunjukkan hasil yang optimal dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Produksi ikan cakalang di Kabupaten Buton khususnya ikan cakalang cukup signifikan. Jumlah produksi komoditas ikan di Kabupaten Buton adalah 2.386.538 Kg dengan nilai produksi Rp 396.406.771.558.

Arah kebijakan pembangunan dibidang perikanan dan kelautan adalah untuk meningkatkan produksi dan pengembangan perikanan dan kelautan maka :

- a. Pemberian kemudahan pada investor khususnya lokal dan dari luar daerah, baik yang sifatnya akan menetap di daerah ini maupun yang bersifat insidentil, baik yang bergerak dibidang pembelian maupun penampungan, hal ini diharapkan berkontribusi terhadap stabilitas harga komoditas perikanan, adanya persaingan harga yang sehat, dan merangsang peningkatan produksi serta peningkatan petani dan nelayan baik pada sektor produksi maupun kesempatan kerja dan berusaha.
- b. Penetapan sistem kemitraan yang saling menguntungkan antara pengusaha perikanan dengan petani / nelayan.

- c. Pemberian paket – paket bantuan alat penangkapan ikan dan paket budi daya rumput laut dalam jumlah terbatas dan selektif sesuai dengan dana yang tersedia kepada nelayan dan petani yang berpenghasilan rendah.
- d. Upaya pengaturan baik yang menyangkut penggunaan jalur penangkapan ikan antara nelayan tradisional dengan nelayan yang menggunakan peralatan modern guna mencegah konflik di lapangan, termasuk dalam hal ini upaya pengawasan penggunaan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan biota laut dan perairan dan keanekaragaman hayatinya serta upaya penertiban administrasi dan kelengkapan pelayaran kapal – kapal penangkap ikan.
- e. Pembinaan terhadap nelayan menyangkut peningkatan keterampilan petani / nelayan baik nelayan tangkap maupun budi daya serta sosialisasi terhadap peraturan di bidang perikanan.

3. Perkebunan

Paradigma pembangunan di bidang perkebunan bergeser dari pembangunan usaha tani skala kecil / partial menjadi usaha tani skala ekonomi, dan sifat usaha perkebunan berubah dari pola konsumtif menjadi komersial yang berorientasi agribisnis dan agroindustri serta agrowisata. Dari data potensial perkebunan di Kabupaten Buton seluas 122.440 Ha, lahan yang telah digarap 75.728 Ha sedangkan yang belum digarap seluas 46.712 Ha.

Pembangunan perkebunan lebih menitikberatkan pada usaha perkebunan rakyat dan perkebunan besar swasta / nasional sebagai sektor penunjang merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk

mencapai peningkatan produksi dan produktifitas perkebunan. Secara lebih detail disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Potensi Perkebunan Kabupaten Buton, 2004

No	Jenis Komoditas	Potensi (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Jambu Mete	39.541	8.227
2.	Kelapa	18.183	9.891
3.	Kemiri	1.044	433
4.	Lain-lain	63.672	-
	Total	122.440	18.551

Sumber : Bappeda Kabupaten Buton, Tahun 2004

Arah kebijakan pembangunan di bidang perkebunan Kabupaten Buton adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi pengelolaan perkebunan agar berhasilguna dan berkelanjutan;
- b. Mendorong peningkatan mutu produksi yang berdaya saing tinggi yang memenuhi standar nasional dan internasional;
- c. Mengupayakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perkebunan;
- d. Mengembangkan dan memperkuat jaringan daya tembus pemasaran produksi hasil perkebunan.

4. Peternakan

Dewasa ini berbagai masalah muncul akibat krisis ekonomi yang melanda bangsa indonesia sejak akhir tahun 1997 sangat dirasakan oleh masyarakat sekarang ini dan ini perlu pemecahan melalui perbaikan dalam pembangunan disegala bidang. Berbagai rangkaian pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini diharapkan dapat

menanggulangi atau memecahkan masalah tersebut termasuk masalah di sektor peternakan khususnya di wilayah Kabupaten Buton, maka kegiatan yang harus dilaksanakan agar berjalan secara sinergis yaitu proses pembangunan harus dilaksanakan secara terus menerus dan penanggulangan kemiskinan yang menerpa masyarakat yang ada di pedesaan.

Dalam melaksanakan pembangunan peternakan ada beberapa hal permasalahan yang dihadapi adalah : kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) relatif masih rendah, belum optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, tingginya biaya produksi peternakan serta terbatasnya sarana pelayanan kesehatan hewan.

Peternakan yang dikembangkan oleh masyarakat di Kabupaten Buton adalah Sapi, kambing, ayam buras dan itik produksi yang diperoleh masih sangat rendah. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan peternakan maka kebijaksanaan yang ditempuh Dinas Peternakan Kabupaten Buton pada 2005 adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan komoditas unggulan berdasarkan kawasan sentra produksi;
- b. Peningkatan skala usaha;
- c. Pengembangan produk yang berorientasi pasar;
- d. Penerapan TTG (Teknologi Tepat Guna) yang ramah lingkungan;
- e. Peningkatan kualitas SDM di bidang peternakan.

5. Kehutanan

Kabupaten Buton memiliki hutan seluas \pm 155.392 Ha, terdiri atas hutan produksi seluas 55.458 ha, hutan lindung seluas 35.550 ha, hutan wisata/PPA seluas 27.745 ha, hutan produksi terbatas seluas 22.600 ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 14.039 ha.

Hutan tersebut memiliki berbagai macam potensi yang cukup besar, tanah yang cukup subur serta kandungan air yang cukup banyak. Jika potensi itu dapat dikelola dan dimanfaatkan secara proporsional maka hasilnya dapat menunjang pendapatan daerah dan negara.

Salah satu isu pokok di bidang kehutanan adalah tingginya tingkat pengrusakan hutan yang berdampak pada menurunnya produktivitas sumber daya hutan serta semakin berkurangnya fungsi hutan sebagai kawasan lindung.

Arah kebijakan pembangunan kehutanan di Kabupaten Buton sampai Tahun 2005 adalah:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam agar berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan;
- b. Menata kembali sistem peraturan daerah tentang pengelolaan sumber daya alam, tata ruang dan wilayah pembangunan dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- c. Mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan secara optimal;

- d. Meningkatkan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

6. Perhubungan

Dalam upaya penyelenggaraan pembangunan daerah, maka bidang perhubungan memegang peranan penting dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah. Semakin meningkatnya kegiatan antar wilayah akan meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sehingga peningkatan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat seiring dengan meningkatnya tuntutan permintaan akan jasa pelayanan yang handal, berkualitas dan terjangkau.

Kebijakan pembangunan bidang perhubungan diarahkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dan memperlancar arus barang dan jasa serta mobilitas manusia;
- b. Meningkatkan keselamatan lalu lintas, kejasa perhubungan;
- c. Menunjang upaya peningkatan pendapatan daerah;
- d. Penataan sarana penunjang perhubungan.

7. Industri, dan Perdagangan

Sebagai penggerak utama roda ekonomi, industri harus efisien dan didukung oleh pertanian yang tangguh dengan basis teknologi yang semakin tinggi dan iklim perdagangan yang sehat, sistem distribusi yang makin meluas dan mantap. Upaya kearah penguatan struktur industri mutlak harus dilakukan baik industri hulu dan hilir maupun antar sektor, antar industri besar, menengah dan kecil, antar sektor

industri dan sektor – sektor penunjangnya diharapkan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi, perolehan divisa dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ada beberapa industri yang berkembang di Kabupaten Buton yaitu : industri pengolahan hasil hutan (rotan dan kayu) serta industri pengolahan hasil laut (rumpun laut) Industri pengolahan hasil perkebunan (pengupasan Jambu Mete), industri pertenunan (tenun kain adat dan pertenunan ATBM)

Adapun permasalahan utama di bidang industri dan perdagangan antara lain :

- a. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di dalam penguasaan teknologi dan manajemen usaha industri;
- b. Dengan rendahnya kualitas SDM pelaku – pelaku industri dan lemahnya penguasaan teknologi proses menyebabkan belum berkembangnya industri – industri pendukung / diversifikasi horisontal dan industri – industri ikutan / diversifikasi vertikal;
- c. Masih kurangnya promosi investasi untuk memanfaatkan potensi industri terutama di bidang agroindustri, dan industri pariwisata;
- d. Kelembagaan produksi dikalangan pelaku – pelaku industri kecil dan menengah belum dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk membangun posisi tawar yang kuat;
- e. Kemitraan usaha antar pelaku – pelaku industri kecil, menengah dan pengusaha besar belum terjalin secara optimal dibidang pemasaran, teknologi dan permodalan;
- f. Belum adanya kawasan industri untuk menjamin kepastian usaha bagi investor;
- g. Pada umumnya pelaku – pelaku usaha di bidang perdagangan belum menguasai jaringan pemasaran terutama pasar luar negeri;

- h. Komoditi – komoditi unggulan daerah masih kurang dikenal oleh para pembeli baik nasional maupun luar negeri, disamping itu kurang dapat bersaing karena mutu yang masih rendah;
- i. Sebagian besar pengusaha atau pedagang tergolong pengusaha kecil yang masih lemah, baik keterampilan manajemen usaha maupun permodalan;
- j. Masih kurangnya pemahaman pelaku – pelaku usaha terhadap berbagai macam peraturan yang menyangkut tertib niaga dan perlindungan konsumen;
- k. Infrastruktur pendukung utama, dalam hal ini pembangunan pasar untuk menggerakkan ekonomi ditingkat kecamatan dan desa masih terbatas

Kebijakan pembangunan industri daerah terus diarahkan pada pengembangan industri yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif, berbasis sumber daya alam, menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, serta lebih memberdayakan industri kecil dan menengah.

Adapun arah kebijakan dibidang industri dan perdagangan adalah mencakup :

- a. Peningkatan kualitas SDM pelaku industri di dalam teknologi produksi, dan manajemen usaha;
- b. Peningkatan produksi terutama melalui diversifikasi produk;
- c. Peningkatan promosi investasi dibidang industri agro, industri logam, kimia dan pariwisata;
- d. Mendorong dan meningkatkan kemitraan usaha bagi pelaku industri dan pengusaha dibidang pemasaran, produksi dan permodalan;

- e. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi pelaku – pelaku dagang terutama pedagang kecil, menengah didalam manajemen usaha;
- f. Penyebaran informasi pasar bahan kebutuhan pokok / strategis dan komoditi – komoditi unggulan daerah;
- g. Memperkuat jaringan pemasaran bagi pengusaha / pedagang antar pulau dan eksportir didalam dan luar negeri;
- h. Mendorong kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok / strategis masyarakat dan pembangunan;
- i. Meningkatkan pemahaman bagi pelaku dagang dan masyarakat berbagai peraturan dibidang tertib niaga dan perlindungan konsumen;
- j. Pembangunan sarana pasar di wilayah kecamatan dan desa / kelurahan

8. Koperasi dan UKM

Koperasi dan PKM sebagai pelaku ekonomi terus ditingkatkan dalam rangka menggairahkan kegiatan ekonomi, memberluas lapangan kerja dan lapangan usaha serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih merata melalui mantapnya iklim yang mendukung pembinaan dan peningkatan usaha Koperasi dan PKM, usaha informal dan tradisional, serta kerjasama kemitraan antara Koperasi, BUMN dan usaha swasta (BUMS).

Untuk mempercepat laju dunia usaha dan pemeratakan kegiatan usaha bagi seluruh lapisan masyarakat, perlu diberikan perhatian pada usaha untuk membina usaha koperasi, pengusaha kecil dan menengah, informal dan tradisional, sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta sebagai soko guru

perekonomian sehingga mampu berperan dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Peran pemerintah dalam pembangunan Koperasi dan PKM akan lebih mengarah sebagai “Regulator, fasilitator, strabilitator dan dinamisator serta stimulator”, pengembangan melalui mekanisme pasar yang sehat dan adil.

Dengan demikian paradigma pembanguinan Koperasi dan PKM kedepan terutama dalam memasuki abad yang diwarnai oleh persaingan yang makin kuat harus mengandalkan kekuatan sendiri yang bercirikan partisipasi, transparansi, emansipasi dan rasionalitas.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah di bidang ekonomi , maka arah kebijakan pembangunan Koperasi dan PKM tahun 2005 adalah sebagai berikut:

- a. Memberdayakan dan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai – nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, terjaminnya kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak – hak konsumen serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Buton sebagai bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam semangat Otonomi Daerah.
- b. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah di era global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan

kerja dan berusaha bagi pengusaha dan masyarakat lokal melalui keunggulan sumber daya alam di bidang kelautan dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.

- c. Memberdayakan dan mengembangkan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif oleh lembaga – lembaga terkait serta peluang usaha yang seluas – luasnya dengan tidak mengabaikan kearifan budaya daerah dan masyarakat lokal. Bantuan fasilitas dari daerah diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan latihan informasi bisnis dan teknologi, permodalan dan lokasi berusaha.
- d. Mempercepat upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi lokal guna membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi melalui upaya dan program yang dikhususkan secara konkrit dan terukur.
- e. Memberdayakan dan mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindari terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif, yang merugikan masyarakat.
- f. Mengoptimalkan peranan pemerintah daerah dan stake holder dalam mengoreksi ketidak sempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar baik pada tingkat kebijakan birokrasi pemerintahan maupun aktivitas pelaku pasar itu sendiri melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan peraturan daerah.

- g. Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi yang berkaitan dengan penyediaan kebutuhan pokok terutama pangan, penyediaan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah dan cepat terhindar dari kesan birokrasi yang berbelit– belit.

9. Pertambangan dan Energi

Berbagai distorsi yang terjadi pada masa lalu telah melemahkan ketahanan ekonomi nasional dan daerah dalam menghadapi krisis yang berdampak pada timbulnya berbagai kesenjangan sosial sehingga gejolak sosial mudah terjadi. Sementara itu, pada masa yang akan datang pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Buton menghadapi dua tantangan utama yang terkait dengan proses globalisasi dan desentralisasi yaitu : *Pertama*, meningkatkan daya saing komoditas melalui peningkatan mutu dan pertumbuhan serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan jasa dan perdagangan, dalam hal ini termasuk pembangunan keunggulan kompetitif yang paa gilirannya akan memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah. *Kedua*, melaksanakan proses desentralisasi ekonomi merupakan kebijakan nasional pada tingkat regional secara bertahap agar potensi sumber daya ekonomi diseluruh wilayah Kabupaten Buton berjalan secara serempak dan meluas yang didukung oleh semakin tumbuhnya prakarsa, jiwa wirausaha, dan kemampuan berusaha dikalangan masyarakat daerah.

Bahan tambang yang sudah dikembangkan dan dieksploitasi di Kabupaten Buton baru bahan tambang aspal yang memiliki kadar bitumen 10 – 40 %. Potensi aspal di Kabupaten Buton disajikan pada

Tabel 3.3, sedangkan potensi bahan tambang lainnya disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4. Potensi Aspal Kabupaten Buton

No	Kecamatan	Data	Luas Areal (Ha)	Spesifikasi	Keterangan
1.	Lasalimu	- Lawele	2.368,35	Warna hitam Kadar Bitumen 10-40%	-
		- Ulala	1.978,2	-	-
2.	Pasarwajo	- Siontapina	2.310,2	-	-
		- Winto	1.946,55	Dikelola dalam bentuk aspal mikro	Cadangan Defosit 3.200.000 m ³ /ton
		- Kabungka	2.327,67	Kadar Bitumen 15-25 %	cadangan Defosit 60.000.000m ³ /ton
		(PT SAKA)	318,52	Produksi 907.976 ton	
3.	Sampolawa	- Waisiu (Rongi)	3.600 97,69	Kadar Bitumen 12,5-40 %	Belum terolah

Sumber : Bappeda Kabupaten Buton, 2004

Tabel 3.4. Potensi Bahan Tambang Kabupaten Buton

No	Bahan Tambang	Kecamatan	Desa	Cadangan Defosit	Ket
1	Marmer	Kapontori	-	Belum terukur	
2	Batu Gamping	Mawasangka	Mawasangka	40.000.000 m ³	Luas area 400Ha
3	Batu Kapur	Gu, lakudo, Mawasangka, Sorowolio, Pasarwajo, Sampolawa	-	Belum terukur	Hampir seluruh hamparan terdiri atas batu kapur
4	Pasir	Batauga		Belum terukur	Masih dikelola masyarakat
5	Fosfat	Sampolawa	Kawi-Kawia	45.000 ton	Kadar fosfat ±25,12% jenis

					insular
6	Mangan	Lasalimu	-	Belum terukur	Kadar Mangan 51, 27%
7	Dolomit	Pasarwajo, Lakudo	-	Belum terukur Belum terukur	Spesifik warna putih kecoklatan Spesifik warna putih
8	Kalsit	Sampolawa	-	Belum terukur	-

Sumber : Bappeda Kabupaten Buton, 2004

Berdasarkan hasil identifikasi lokasi oleh CONOCO BUTON LTD, Kabupaten Buton mempunyai potensi cadangan minyak yang tertangkap pada struktur geologi dalam bentuk antiklim yang terdapat pada wilayah Lambusange Kecamatan Kapontori dengan spesifikasi cairan berwarna kekuning-kuningan.

Selain potensi energi minyak bumi, juga beberapa sungai potensial untuk sumber energi. Salah satu sungai yang sudah dimanfaatkan adalah sungai Wimming dan Pasarwajo dengan kemampuan daya 1,6 MGwt

Arah kebijakan program pembangunan di bidang pertambangan dan energi Kabupaten Buton adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemanfaatan bahan galian dan pertambangan yang ditopang oleh penggunaan teknologi dan penerapan manajemen yang profesional dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan berkontribusi pada pendapatan nasional dengan senantiasa memperhatikan kelesarian lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan penyediaan, pemanfaatan dan pelayanan tenaga listrik, air bersih dan telekomunikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal dan dunia usaha;

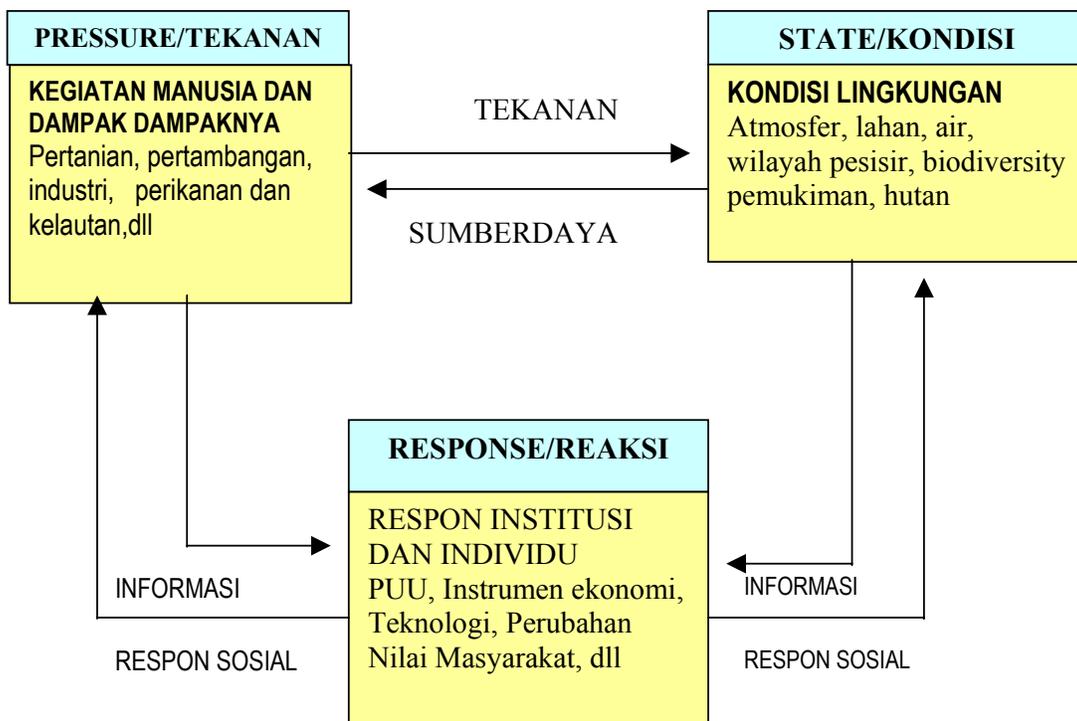
- c. Melakukan inventarisasi potensi daerah di bidang pertambangan dan energi untuk dikembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi pendapatan daerah;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya aparat di bidang pertambangan dan energi untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS KEBIJAKAN

Evaluasi dan analisis kebijakan pembangunan Kabupaten Buton dilakukan dengan menggunakan pendekatan model Tekanan-Status-Respon (Pressure – State – Response / P-S-R model) yang meliputi gambaran umum lingkungan dari tiga sudut pandang, yaitu (1) Kegiatan Manusia yang menimbulkan tekanan pada lingkungan, seperti kegiatan pertanian, industri, pertambangan, perikanan dan kelautan, dan lain-lain; (2) Kondisi lingkungan seperti degradasi hutan, polusi udara dan air, hilangnya beberapa jenis biodiversity, dan lain-lain; (3) Kegiatan untuk menanggulangi perubahan lingkungan, seperti kebijaksanaan pemerintah dan respon masyarakat. Kerangka pikir dari pendekatan model P-S-R ini adalah sebagai berikut:

Model Pressure-State-Response (P-S-R), OECD, 1993 dalam PILH, 2001



3.1 Kegiatan Manusia dan Dampaknya (Tekanan)

Beberapa kegiatan manusia yang mempunyai tekanan yang tinggi terhadap kemerosotan sumberdaya alam dan lingkungan adalah:

1. Pertanian

Sebagai daerah yang baru berkembang, maka motor penggerak utama ekonomi atau kegiatan pembangunan daerah bertumpu pada penggunaan sumber daya alam terutama sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan kelautan. Berdasarkan besarnya sumbangan terhadap PDRB Kabupaten Buton, maka kegiatan sektor pertanian memberikan sumbangan paling banyak yaitu sekitar 32,35 %. Pembukaan lahan untuk pertanian terus meningkat, sehingga menyebabkan semakin luasnya hutan yang dikonservasi setiap tahunnya. Tingginya aktivitas pertanian di Kabupaten Buton yang tidak diikuti oleh penerapan teknologi budidaya yang baik serta tidak dilakukan pertanian konservasi, menyebabkan terjadinya penurunan kesuburan tanah dan tekanan terhadap sumber daya hutan.

Degradasi hutan di Kabupaten Buton selain disebabkan oleh kegiatan pertanian juga oleh adanya kegiatan eksploitasi sumber daya hutan, baik dilakukan oleh masyarakat secara liar maupun oleh pemegang konservasi hutan, peladang berpindah, kebakaran dan lain-lain.

Pengembangan pertanian akan memberikan dampak terhadap penurunan keanekaragaman hayati, serta peningkatan bahaya erosi dan sedimentasi.

Potensi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Buton seluas 400.802 Ha yang terdiri dari ubi kayu 9221 Ha, jagung 400.458, kacang tanah 832 Ha dan kacang kedelai 291 Ha. Produksi masing-masing komoditas pertanian tanaman pangan dan perkebunan dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan 3.2

2. Perikanan dan Kelautan

Pembangunan sektor perikanan dan kelautan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui peningkatan produksi pada kegiatan perikanan. Hal ini sangat memungkinkan karena wilayah Buton sebagian besar wilayah perairan laut (86,47 % dari luas total wilayah Kabupaten Buton) mempunyai potensi yang sangat besar dan melimpah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat.



Produksi perikanan di Kabupaten Buton diperoleh dari perikanan tangkap dan budidaya dengan nilai produksi dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5. Produksi Perikanan Budidaya dan perikanan tangkap di Kabupaten Buton.

No	Jenis	Potensi (Ha)	Produksi (ton)
1.	Tuna	-	3554,82
2.	Cakalang	-	1256,32
3.	Tongkol	-	8382,82
4.	Tenggiri	-	576,25
5.	Layang	-	9743,01
6.	Lema/Kembung	-	846,95
7.	Alu-alu	-	611,68
8.	Julung-julung	-	-

9.	Kuwe/ Bubara	-	1.062,41
10.	Selar	-	879,64
11.	Lemuru	-	91,93
12.	Ekor kuning,	-	
13.	Lalosi	-	610,62
14.	Kerapu	-	280,92
15.	Teri	-	570,4
16.	Tembang	-	919,28
17.	Sunu	-	150,17
18.	Kakap	-	191,91
19.	Rajungan	-	8,81
20.	Teripang	-	1.3
21.	Baronang	-	-
22.	Rumput Laut	-	753.820.000
23.	Kerang Mutiara	-	250.000.000

Sumber : Bappeda Kabupaten Buton, 2004

Berdasarkan tabel 3.5 di atas nampak bahwa peningkatan nilai produksi perikanan pada tahun 2003 sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terutama pada perikanan laut. Namun harus diakui bahwa masih akan banyak diantara nelayan di Kabupaten Buton kita masih melakukan kegiatan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak, bius dan pukat harimau. Dampaknya dari kegiatan ini adalah merusak ekosistem terumbu karang seperti yang terjadi di perairan Batauga, Lasalimu, Pasarwajo, Mawasangka dan lain-lain.

Sebagai dampak dari penggunaan bahan peledak dan bahan kimia (bius) pada penangkapan ikan di Kabupaten Buton menyebabkan ekosistem terumbu karang mengalami penurunan produktivitasnya sehingga nelayan terpaksa menangkap ikan jauh dari desa-desa mereka. Disamping itu, pada daerah penangkapan tertentu seperti di Pasarwajo sudah gejala budaya tangkap lebih (*over fishing*) oleh karena semakin sulit mereka mendapat/menangkap ikan di perairan tersebut (wawancara dengan masyarakat). Akibat pemboman dan bius menyebabkan penurunan keanekaragaman karang dan ikan-ikan yang ada di ekosistem karang tersebut.

Tabel 3.4. Potensi Areal Tambak dan Budidaya Laut, Tahun 2003

No	Kecamatan	Budidaya Tambak (Ha)		Budidaya Laut (Ha)	
		Terolah	produksi	Terolah	Produksi
1.	Kapontori	3	10	70	-
2.	Mawasangka	40	67	450	-
3.	Lasalimu	18	24	2800	-
4.	Lasalimu selatan	12	150	-	-
5.	Pasarwajo	-	-	-	-

Sumber : Bappeda Sultra, 2002

3. Pertambangan dan Energi

Potensi pertambangan di Kabupaten Buton cukup tersedia. Namun hasil tambang yang baru diolah secara ekonomi adalah aspal dengan aktivitas produksi dan penjualan. Perkembangan pertambangan aspal di Kabupaten Buton dapat disajikan pada Tabel 3.5. Selain itu Kabupaten Buton kaya juga dengan hasil tambang lainnya seperti Batu Gamping, Batu Kapur, pasir, Fosfat, Mangan, Dolomit dan kalsit. Minyak bumi juga telah diidentifikasi oleh CONOCO BUTON Ltd ada di Kabupaten Buton yaitu di Kecamatan Kapontori namun depositnya belum terukur.

Tabel 3.6. Perkembangan Produksi Aspal Buton Tahun 1997 - 2003

Tahun	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Juta Rp.)
1997	115.384,00	4.142,00
1998	40.204,00	3.047,00
1999	26.381,00	1.988,00
2000	3.671,00	1.372,00
2001	1.043,5	203,84
2002	976,18	238,18
2003	12.096,66	8.661,52

Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka, 2003

Dari Tabel 3.6 diatas terlihat bahwa produksi tertinggi terjadi pada tahun 1997 sebanyak 115.348 ton dengan nilai produksi 4.142 juta rupiah

menyusul tahun 1996 sebanyak 85.154 ton dengan nilai produksi 3.111 juta rupiah dan tahun 2000 produksi sangat menurun dratis yakni sebesar 5.871 ton dengan nilai produksi sebesar 1.440 juta rupiah, menyusul tahun 1995 sebesar 27.867 ton dengan nilai produksi sebesar 991 juta rupiah, bahkan pada tahun 2001 mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu 1.043,50 ton dengan nilai produksi sebesar 203,84 juta.

Saat ini Kabupaten Buton sedang dilirik banyak investor untuk menanamkan modalnya pada sektor pertambangan aspal di Kecamatan Lasalimu dan Sampolawa yang saat ini sedang dilakukan eksplorasi. Pengembangan pertambangani menjadi salah satu sumber penghasilan daerah (PAD) Kabupaten Buton. Namun demikian, meskipun banyak hasil tambang, dalam operasinya perlu diperhatikan aspek–aspek lingkungan hidup, karena kegiatan penambangan dapat menimbulkan dampak terhadap perubahan bentang alam, hilangnya vegetasi sebagai habitat beberapa jenis satwa dan perubahan pola aliran air permukaan serta polusi udara dan perubahan iklim mikro.

Selain tambang aspal, jenis tambang yang juga cukup rawan terhadap penurunan sumberdaya alam adalah penambangan pasir, batu kali dan batu gunung untuk kebutuhan bahan bangunan. Lokasi potensial untuk kegiatan ini adalah pada bantaran sungai, gunung – gunung batu dan wilayah pesisir, seperti di Kecamatan Pasar Wajo, Batauga dan Lasalimu.

Kondisi ini sangat memprihatinkan, karena daerah – daerah tersebut dilihat dari aspek tata ruang Kabupaten Buton merupakan sentra pengembangan ekonomi di kawasan ini. Sangat ironis memang, sebab Kecamatan Lasalimu dan sekitarnya juga merupakan satu – satunya lokasi penyangga tata air di Kabupaten Buton yang masih tersisa, sementara hampir semua peruntukan kegiatan pembangunan pertanian, pertambangan dan transmigrasi umum, transmigrasi terpadu dan eksodus ditempatkan di Laslimu.

Sangat ironis, ternyata pertumbuhan fisik pertambangan tidak diikuti oleh peningkatan kontribusi sektor ini pada PDRB Kabupaten Buton. Hal ini diperkirakan terjadi akibat sistem pencatatan neraca sumber daya pertambangan belum memadai. Dalam prakteknya masih terdapat kecenderungan menghindari biaya retribusi. Hal ini sangat merugikan tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek pemulihan lingkungan lokasi pertambangan dalam jangka panjang.

4. .Industri

Beberapa jenis industri yang dikembangkan di kabupaten Buton yaitu industri pengolahan hasil hutan, industri pengolahan hasil laut, industri hasil perkebunan dan industri pertenunan.

Industri hasil hutan yang dikembangkan adalah pada komoditas rotan dan kayu dengan lokasi sentra produksi di Lasalimu, Kapontori, Batauga dan sampolawa. Jenis industri ini apabila tidak dibatasi maka tekanannya terhadap kemerosotan sumberdaya hutan akan semakin tinggi yang berimplikasi pada semakin luasnya pembukaan lahan hutan menyebabkan erosi dan sedimentasi pada badan air dan muara sungai-sungai yang ada di wilayah Kecamatan Lasalimu, kapontori, batauga dan sampolawa.

Industri pengolahan hasil laut dampaknya terjadi pada produksi limbah ikan yang dapat mencemari perairan sekitarnya. Namun sampai saat ini hasil pemantauan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton menemukan bahwa kualitas air di sekitar PT. Trico di Pasar Wajo dan PT. Luyun di Lasalimu masih baik seperti disajikan pada tabel 3.7 dan 3.8. berikut ini.

Tabel 3.7. Rata-Rata Hasil Pengukuran Kualitas Air Sumur, Sungai dan Limbah Cair pada PT. Trico

No.	Parameter	Satuan	Lokasi			NAB**
			I	II	III	
	1. Fisik					
1.	Suhu Udara	°C	30	30	30	-
2.	Suhu Air	°C	27	29	29	38
3.	Warna	Skala TCU	9	9,8	11	-
4.	Kekeruhan	NTU	21	22	22	-
5.	TSS	mg/l	13	24	38	200
6.	TDS	mg/l	198	335	267	2000
	2. Kimia					
7.	DO	mg/l	6,0	6,8	6,3	-
8.	BOD ₅	mg/l	6,5	6,2	3,8	50
9.	COD	mg/l	7	4,5	4,5	100
10.	PH	-	7,8	7,6	6,8	6 - 9
11.	NH ₃	mg/l	ttd	ttd	0,3	1
12.	NO ₃	mg/l	ttd	ttd	4,3	20
13.	NO ₂	mg/l	ttd	ttd	0,08	1
14.	Besi	mg/l	*	ttd	ttd	5
15.	Fluorida	mg/l	*	ttd	ttd	2
16.	Kesadahan	mg/l	*	152	ttd	-
17.	Klorida	mg/l	*	168	ttd	1
18.	Minyak	mg/l	ttd	ttd	0,68	10

Catatan : Lokasi I = Kualitas Air Sumur ttd = Tidak Terdeteksi
 Lokasi II = Kualitas Air Sungai * = Tidak Dilakukan Pengukuran

Lokasi III = Kualitas Air Limbah

**= Kep-51/MENLH/10/1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri

Industri hasil perkebunan menghasilkan limbah padat berupa kulit jambu mete dimana selama ini dijadikan sumber bahan organik oleh petani yang ada di Lakudo dan Gu. Limbah kulit mete adalah limbah organik sehingga apabila tererosi ke perairan dapat menyebabkan terjadinya

eutrofikasi pada perairan khususnya sungai dan badan air lainnya sehingga berakibat pada penurunan kualitas air dan produktivitas perairan.

Tabel 3.8. Tabel Hasil Pengukuran Kualitas Air di Kabupaten Buton

No	Parameter	Lasalimu	Pasarwajo	kapontori	Gu	Lakudo	Mawasangka
1.	Salinitas	3 4- 35	3 0- 33,5	34 - 35	30,9 - 32,1	29,8 - 32,1	28,7 - 32,1
2.	PH	7,4 - 7,6	7,3 - 80	7,4 - 7,6	8,0 - 8,1	7,9 - 8,2	7,8 - 8,1
3.	DO	4,8 - 6,2	5,2 - 6,4	4,7 - 6,0	4,9 - 8,1	5,1 - 7,9	5,0 - 6,4
4.	Suhu	28 - 30	30 - 33,5	28 - 30	27 -30	27 - 29	27 - 30
5.	Kecepatan Arus	1,09 - 2,04	0,12 - 0,24	0,12 - 3,17	0,091	0 - 1,77	0 -1,77
6.	Posfat	0,08 - 0,10	-	0,04 - 0,047	0,055 - 0,216	0,038 - 0,22	0,085 - 0,141
7.	Nitrat	0,57 - 1,63	-	0,21 - 0,73	0,022 - 0,096	0,0,14 - 0,029	0,017 - 0,028
8.	Kekeruhan (TNU)	0,20 - 0,63	-	0,26 - 0,28	0,28 - 0,56	0,15 - 0,30	0,30 - 0,50
9.	Kecerahan	0,20 - 0,41	-	-	-	-	-
10.	Tipe Substrat	pasir karang,pasir liat,karang	pasir karang,pasir liat,karang	pasir karang,pasir liat,karang	-	-	-

Sumber: Bappeda Sultra, 2002

3.2. Kondisi Lingkungan (Status)

3.2.1. Atmosfir

Kondisi atmosfer atau udara di wilayah Kabupaten Buton masih sangat baik. Hal ini disebabkan antara lain emisi gas dari kendaraan bermotor dan industri masih sangat terbatas di daerah ini. Namun demikian pada lokasi tertentu yaitu pada kawasan industri, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan arus padat lalu lintas apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran udara (polusi). Pencemaran udara terjadi karena limbah udara atau emisi yang mengandung zat pencemar yang berasal dari pembakaran sumber energi, minyak, batu bara, kayu bakar, gas buangan kendaraan dan industri, partikel-partikel debu yang berasal dari asap industri, dan debu-debu jalanan yang dibawa oleh angin. Berbagai zat pencemar yang mencemari udara adalah CO, CO₂, SO₂, NO, NO₂, As, Cd, Pb, hidrokarbon dan debu (asbes, abu dan sebagainya).

Untuk kasus di Kabupaten Buton, terdapat beberapa sumber emisi/gas buangan adalah: kendaraan bermotor, pembakaran kayu, kebakaran hutan, industri pengolahan hasil perikanan dan Pusat Listrik Pembangkit Tenaga Diesel PLN. Namun sampai tahun 2004 ini kualitas udara di Kabupaten Buton masih baik seperti disajikan pada Tabel 3.9. Pencemaran udara yang terjadi di Kabupaten Buton khususnya di ibukota Kabupaten dan sekitarnya disebabkan oleh partikel debu, akan tetapi konsentrasi partikel debu tersebut berdasarkan hasil pengukuran pada tahun 2003 masih berada di bawah ambang batas.

Tabel 3.9. Kualitas udara Kota Pasar Wajo Kabupaten Buton.

No	Lokasi	Parameter				
		NO ₂ μ/Nm ³	SO ₂ μ/Nm ³	CO μ/Nm ³	Pb μg/m ³	Debu mg/m ³
1	Banabungi	160	51	6.450	0,10	0,160
2	Wakoko	150	53	6.180	0,1	0,148
3	Takimpo	160	47	6.260	0,03	0,153
Nilai Ambang Batas: PP 41/1999		400	365	30.000	2	0,26

Sumber : ANDAL Pembangunan Ibukota Kabupaten Buton, 2003

3.2.2. Air

Kondisi air permukaan dan perairan pesisir dan laut Kabupaten Buton masih relatif baik walaupun pada beberapa tempat seperti pelabuhan rakyat diduga telah terjadi pencemaran akibat pengelolaan minyak yang kurang baik dan semakin banyaknya jumlah kapal yang



beroperasi. Dampak yang akan ditimbulkan akibat adanya pencemaran di perairan adalah mengganggu aktivitas dan mematikan biota yang ada di perairan. Hasil penelitian Bappeda Tahun 2002 dan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Haluoleo Tahun 2003 menunjukkan bahwa kondisi perairan laut dan sungai di Kabupaten Buton masih baik (Tabel 3.7 dan Tabel 3.8),

Pada badan-badan sungai di Kabupaten Buton terutama pada saat musim hujan menjadi keruh (polusi fisik) sebagai akibat dari tingginya sedmien yang masuk ke sungai oleh karena adanya erosi yang tinggi pada lahan-lahan terbuka yang tanpa menerapkan teknik konservasi yang baik. Penyebab pembukaan lahan tersebut adalah konversi menjadi pertanian, peladangan berpindah dan penebangan hutan secara liar serta lahan bekas tambang aspal.

3.2.3. Lahan

Penggunaan Lahan khususnya lahan kering di Kabupaten Buton adalah untuk pekarangan (6.620 ha), tegal/kebun (26.076 ha), lading/huma (19.735 ha), dan padang rumput/penggembalaan (6.406 ha).

Pembukaan lahan pertanian baru cukup berkembang oleh karena bertambahnya jumlah penduduk. Produksi pertanian di Kabupaten Buton masih tergolong rendah seperti disajikan pada Tabel 3.1. dan Tabel 3.2, sementara luasan hutan yang dikonversi untuk lahan pertanian cukup tinggi. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan pertanian di Kabupaten Buton harus mengutamakan kegiatan intensifikasi pertanian dibanding pendekatan lainnya.



Di beberapa wilayah, sebagian besar lahan yang ada terdiri atas batu kapur dan pasir yang kurang menguntungkan untuk lahan pertanian.

Menghadapi kondisi kemampuan lahan yang rendah ini maka para petani, khususnya petani tanaman pangan yang jumlahnya relatif besar menemukan kesulitan untuk berusaha secara konsentrasi dan menetap. Kenyataan inilah yang memaksa mereka mencari sumber kehidupan lain dengan tidak lagi memperhitungkan resiko terjadinya kerusakan lingkungan dan bahkan resiko yang mengancam keselamatan jiwanya sekalipun. Jumlah lahan kritis di daerah ini diperkirakan tidak kurang dari 129.000 Ha, yaitu dalam kawasan hutan kurang lebih 46.000 Ha dan di luar kawasan hutan kurang lebih 83.000 Ha. Jumlah lahan kritis tersebut akan terus meningkat apabila kegiatan masyarakat seperti perladangan berpindah – pindah, penebangan liar, penyerobotan kawasan hutan dan lain – lain apabila tidak segera dikendalikan dengan baik.

3.2.4. Penurunan keanekaragaman hayati

Perilaku manusia dalam mengeksploitasi sumberdaya alam tidak hanya menyebabkan berbagai kemunduran sumberdaya fisik saja tetapi juga berdampak pada sumberdaya hayati. Hal ini terjadi karena pengurusan sumberdaya hayati seperti penebangan hutan, perdagangan dan berburu biota unik yang menyebabkan kelangkaan



dan akhirnya kepunahan. Jenis biota yang dalam proses kepunahan di Kabupaten Buton, untuk kelompok aves antara Kakatua, Nuri, Maleo;

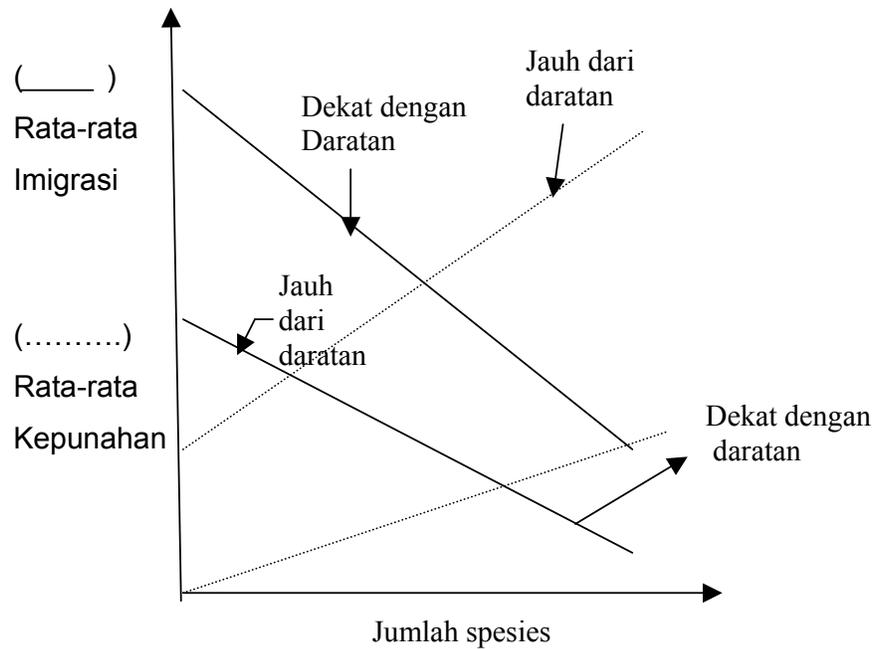
kelompok mamalia antara lain Rusa, Kuskus dan Anoa; dan dari kelompok reptilia antara lain buaya yang sudah jarang ditemukan di Kabupaten Buton.

Kerusakan habitat merupakan ancaman utama terhadap keanekaragaman hayati dan dapat menyebabkan kepunahan beberapa species di Kabupaten Buton. Pengrusakan dapat terjadi akibat adanya kegiatan perubahan habitat secara langsung seperti penebangan hutan terrestrial, penebangan hutan bakau, perusakan terumbu karang atau dapat terjadi secara tidak langsung akibat pencemaran berupa sedimentasi. Ledakan nutrisi (eutrofikasi), perubahan suhu dan peningkatan kadar garam.

Kabupaten Buton memiliki banyak pulau-pulau kecil baik yang berpenghuni maupun yang tidak, yang tidak tertutup kemungkinan mempunyai biodiversitas yang tinggi. Tetapi sangat rentan karena ancaman kepunahan yang sangat tinggi sebagai akibat dari cadangan makanan yang ada di pulau-pulau kecil sangat terbatas.

Menurut teori keseimbangan biogeografi dari MacArthur dan Wilson (1967) bahwa jumlah spesies yang ada di pulau ditentukan oleh keseimbangan antara spesies yang imigrasi dan punah. Apabila pemanfaatan lebih besar dari spesies yang imigrasi maka dalam kurun waktu tertentu akan terjadi kelangkaan jenis. Akan tetapi apabila terjadi pemanfaatan yang berimbang dengan imigrasi maka terjadi keseimbangan dinamik, dimana spesies yang terancam punah akan digantikan melalui proses imigrasi baik dari spesies yang sama maupun yang berbeda.

Selanjutnya menurut teori di atas bahwa semakin jauh letak pulau kecil dari daratan utama, maka semakin tinggi peluang terjadinya kepunahan spesies seperti dijelaskan pada gambar 1.



Gambar 1. Hubungan antara kepunahan dan imigrasi spesies pada Pulau Kecil (Elliot, 1993).

Sebagai ekosistem tropika, Kabupaten Buton mempunyai ekosistem hutan dan terumbu karang yang kompleks. Setiap kerusakan pada daerah tersebut akan menimbulkan eksek pada ekosistemnya maupun pada sumber alam lainnya serta lingkungannya. Perubahan dalam ekosistem tidak hanya terjadi pada flora tapi juga pada komponen faunanya (Soerjani, 1997)

3.3. Kegiatan Untuk Menanggulangi Perubahan Lingkungan (Respon)

Berbagai kegiatan penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan dilakukan baik melalui kebijakan pemerintah maupun oleh masyarakat dan organisasi non pemerintah.

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Buton

Kebijakan pemerintah Kabupaten Buton dalam penanggulangan kerusakan dan pencemaran akibat kegiatan pertanian, adalah :

- a. Mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan secara optimal.
- b. Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam.
- c. Penyuluhan untuk penerapan dosis pupuk dan pestisida
- d. Pengembangan pertanian lahan pada intensifikasi baik pada lahan kering maupun lahan basah dengan demikian mengurangi pembukaan lahan baru.
- e. penerapan pertanian konservasi melalui pengembangan tumpang sari
- f. Pemantauan yang kontinyu pengawasan dan evaluasi standar mutu lingkungan, dalam upaya ini termasuk penataan ruang, pemukiman dan industri yang konsisten dengan pengendalian pencemaran lingkungan.

Sedangkan untuk menanggulangi masalah lingkungan di wilayah pesisir dan laut sebagai akibat kegiatan perikanan dan kelautan, maka Kabupaten Buton merumuskan kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembinaan terhadap nelayan menyangkut pengetahuan dan keterampilannya akan masalah perikanan.
- b. Sosialisasi peraturan-peraturan di bidang perikanan dan kelautan.
- c. Pengembangan Teknologi. Penggunaan sumber daya manusia yang ramah lingkungan termasuk teknologi terbaik, lokal, daur ulang yang tersedia.
- d. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan melalui pendekatan keagamaan, adat dan budaya.
- e. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam agar berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan.
- f. Pelaksanaan Reboisasi dan rehabilitasi Hutan dan lahan kritis, wilayah pesisir pantai dan lahan bekas pengelolaan SDA.

- g. Pendataan batas kawasan Hutan dan laut, pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang Sistem Informasi SDA dan Lingkungan hidup.
- h. Peningkatan akses informasi kepada masyarakat.
- i. Pengkajian kembali kebijakan pengelolaan konservasi dan rehabilitasi SDA.
- j. Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman Hayati darat dan laut
- k. Pengembangan teknologi penggunaan SDA yang ramah Lingkungan termasuk Teknologi yang terbaik, teknologi Lokal dan teknologi Daur Ulang yang tersedia.
- l. Pengendalian pencemaran air, tanah, udara dan laut.
- m. Pendataan kawasan ekosistem hutan yang rentan terhadap kerusakan termasuk wilayah pesisir, kepulauan dan terumbu karang.
- n. Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian pemanfaatan SDA, khususnya Sumber Daya Laut melalui metode MCS (*Monitoring, Controlling, Surveillance*).

Kegiatan pemerintah untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan, dan industri dan kegiatan lainnya adalah:

- a. Pengembangan riset terhadap potensi dan pemanfaatan SDA dan pelestarian lingkungan hidup (LH) dan usaha meningkatkan nilai tambah yang optimal di pasar Global dan kualitas lingkungan hidup melalui mekanisme pembiayaan yang berasal dari hasil pemanfaatan SDA.
- b. Pengembangan Industri pemanfaatan Flora, Fauna serta Biota laut lainnya yang memiliki keunggulan Koporatif.
- c. Pengembangan teknologi yang berwawasan lingkungan, khususnya teknologi tradisional yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber daya Air, Sumber daya hutan, Sumber daya pesisir dan kelautan serta industri yang ramah lingkungan.

- d. Pengembangan Teknologi pengelolaan limbah rumah tangga, industri dan transportasi.
- e. Pengembangan Teknologi produksi bersih.
- f. Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) tentang pengelolaan SDA.
- g. Penetapan kebijakan yang membuka peluang akses dan kontrol masyarakat terhadap pengelolaan SDA dan Lingkungan hidup.
- h. Penguatan Institusi dan Aparatur dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.
- i. Pengakuan kelembagaan adat dan lokal dalam kepemilikan dan pengelolaan SDA.
- j. Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan SDA lintas wilayah Administrasi darat dan laut.
- k. Peningkatan jumlah dan kualitas anggota masyarakat yang peduli dan mampu mengelola SDA dan melestarikan lingkungan hidup.
- l. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA dan pemeliharaan LH melalui pendekatan keagamaan, adat dan budaya.
- m. Pengembangan pola kemitraan dengan kelembagaan masyarakat yang melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan SDA dan pemeliharaan LH.
- n. Perlindungan hak – hak adat dan ulayat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian LH.
- o. Pemasarakatan pembangunan berwawasan Lingkungan.
- p. Pengkajian keadaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat adat dan lokal.
- q. Pemanfaatan kearifan tradisional dalam pemeliharaan LH.
- r. Perlindungan terhadap Teknologi tradisional dan ramah lingkungan.
- s. Peningkatan kepatuhan dunia usaha dan masyarakat terhadap Peraturan Perundang – undangan dan tata nilai masyarakat lokal yang berwawasan lingkungan.

2. Respon Masyarakat

Mengamati respon masyarakat terhadap perubahan kondisi lingkungan di Kabupaten Buton baik secara individu maupun kelembagaan belum berkembang dengan baik. Mereka umumnya belum mengetahui dampak kegiatan mereka terhadap ekosistem, baik hutan maupun laut.

Beberapa kelompok masyarakat yang difasilitasi oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) antara lain oleh Jaringan LSM pesisir telah menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Lasalimu misalnya, sudah berpartisipasi menanam bakau, kemudian masyarakat di Desa Tira-Tira pada tahun 2002 yang lalu juga sudah melakukan pengelolaan wilayah pesisir melalui penanaman bakau.

Masyarakat yang ditinggal di wilayah pesisir Kabupaten Buton, umumnya telah mengembangkan kegiatan budidaya laut seperti rumput laut, dan karamba jaring apung, yang dikembangkan antara lain di Kecamatan Lakudo, Gu, Lasalimu, Pasarwajo, Mawasangka, Batauga dan Telaga Raya. Kegiatan budidaya ini secara bertahap dapat mengurangi tekanan terhadap gejala tangkap lebih (*over fishing*) yang saat ini sudah terasa oleh masyarakat. Disamping itu, dapat mengalihkan kegiatan lain yang tidak ramah lingkungan misalnya penggunaan bahan peledak dan bius. Kegiatan tersebut juga dapat mengalihkan kegiatan masyarakat penambang pasir khususnya di Batauga. Dengan semakin berkurangnya kegiatan penambangan pasir di Batauga dapat mengurangi pengangkutan massa pasir yang selama ini berfungsi sebagai penyangga pantai dan obyek wisata pantai.

BAB IV

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi kebijakan terhadap berbagai respon yang dilakukan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Buton, maka rencana aksi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah lingkungan hidup di Kabupaten Buton untuk tahun 2004/2005 adalah sebagai berikut:

- a. Mengupayakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam bidang pengelolaan lingkungan melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan secara optimal
- b. Pengembangan pertanian konservasi pada lahan-lahan pertanian yang sudah ada
- c. Penerapan pertanian dengan pendekatan intensifikasi untuk menghindari pembukaan lahan dan hutan;
- d. Mengintegrasikan antara kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan melalui program Kredit, Pengembangan mata pencaharian dan rehabilitasi lahan baik di wilayah pesisir maupun di daratan;
- e. Sosialisasi peraturan-peraturan di bidang perikanan dan kelautan serta lingkungan hidup kepada nelayan;
- f. Pengembangan baseline data lingkungan hidup Kabupaten Buton;
- g. Proyek pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan kegiatan : (i) Inventarisasi dan evaluasi potensi sumber daya alam hutan dan terumbu karang, dan (ii). Pendataan kawasan ekosistem hutan dan terumbu karang yang rentan terhadap kerusakan;
- h. Program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dengan kegiatan : (i). Pengendalian pencemaran air dan tanah, dan (ii). Pemantauan, pengawasan dan evaluasi standart mutu lingkungan.
- i. Program penataan kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup, dengan kegiatan : (i). Penyusunan peraturan Daerah tentang pengelolaan sumber daya alam, (ii). Penguatan institusi dan aparatur dalam pengelolaan sumber

- daya alam dan lingkungan hidup, (iii). Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya laut melalui metode MCS, dan (iv). Pengakuan kelembagaan adat dan lokal dalam kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam.
- j. Proyek peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, dengan kegiatan : (i). Peningkatan jumlah dan kualitas anggota masyarakat yang peduli dan mampu mengelola sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan (ii). Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup melalui pendekatan keagamaan, adat dan budaya.
 - k. Pengembangan pola kemitraan dengan lembaga masyarakat yang melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) BPS, 2003, Kabupaten Buton Dalam Angka Tahun 2003, Kantor Statistik Kabupaten Buton, Bau-Bau.
- 2) Pemerintah Kabupaten Buton, 2004, Laporan Analisis Dampak Lingkungan Kegiatan Terpadu Pembangunan Pusat Ibukota Kabupaten Buton di Pasarwajo, kerjasama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Buton dengan PPLH-LP Unhalu Kendari.
- 3) Pemerintah Kabupaten Buton, 2001. Pola dasar Pembangunan Kabupaten Buton 2002-2005.
- 4) Soerjani, M., 1997. Pembangunan dan Lingkungan. Meniti Gagasan dan Pelaksanaan Sustainable Development. IPPL Jakarta.
- 5) Soerjani, 1999. Pembangunan dan Lingkungan, Gajah Mada Press, Yogyakarta
- 6) Soemarwoto Otto, 2001, Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 7) PPWPL, Bappeda Provinsi Sultra, 2003, Identifikasi
- 8) Atlas Pesisir Sultra